

**KENDALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DALAM PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG
PELANGGARAN KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI
PROSTITUSI DI PAYALABU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I)



O L E H

MUHAMMAD FAZLI
NIM : 10424025104

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **KENDALA PEMERINTAH DAERAH KAB. KARIMUN DALAM PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI PROSTITUSI DI PAYALABU MENURUT HUKUM ISLAM** “. Pelanggaran kesusilaan dipenelitian ini berupa kegiatan prostitusi dan fokus penelitiannya adalah kendala pemerintah daerah Kab. Karimun terhadap pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 dalam penertiban prostitusi di lokasi Payalabu yang ada di Kab. Karimun.

Adapun latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini adalah karena penulis melihat bahwa daerah Kab. Karimun khususnya di lokasi Payalabu dan umumnya di Kota Karimun sering terjadi atau semakin banyaknya pelanggaran kesusilaan yang berkembang terutama kegiatan prostitusi, dan hal ini sangat mengganggu dari pada kehidupan masyarakat baik itu moral atau mental kualitas fisik (kesehatan) masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan, tetapi Perda tersebut tidak berjalan dengan seperti mana yang diinginkan. Untuk mengetahui bagaimana Realita PSK dilokalisasi, bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002, Kendala Pemda dalam pelaksanaan Perda tersebut terhadap penertiban prostitusi, dan tinjauan hukum Islam terhadap kendala dalam pelaksanaan tersebut ? Inilah yang menjadi latar belakang penulis ingin mengadakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan yang menjadi sasaran penelitian yaitu di daerah Kab. Karimun dan lokasi Payalabu sebagai tempat lokasi PSK.

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini ,penulis mendapatkannya dari instansi-intansi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan perda No.06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban prostitusi yaitu Kepolisian , Sat Pol PP dan Dinas Sosial ,data tersebut penulis namakan kepada data (*Primer*) yang penulis peroleh melalui observasi dan wawancara . Sedangkan data-data yang penulis peroleh dari angket yang penulis sebarakan kepada responden (PSK) penulis namakan kepada data (*Skunder*).

Setelah data-data tersebut didapatkan, penulis menganalisisnya dengan pendekatan (metode) deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan kaedah-kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada setelah itu diadakan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa *Pertama*, terhadap realita PSK berada dilokalisasi 45% adalah dikarenakan faktor ekonomi dan kurang dari 50% Pemerintah Kabupaten Karimun berperan dalam menanggulangi permasalahan prostitusi di lokalisasi Payalabu. *Kedua*, Terhadap pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya terhadap pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi di lokalisasi Payalabu belum optimal dilaksanakan. *Ketiga*, adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaannya yaitu bersifat interen dan eksteren.

Menurut tinjauan hukum Islam terhadap kendala dalam pelaksanaan perda No.06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya terhadap pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi sangatlah bertentangan, kecuali penerapan sanksi atau hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi. Dan terhadap faktor yang menghambat dari pelaksanaan pemerintah daerah terutama yang diberi wewenang untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan. `

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| MOTTO | iii |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Batasan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II : KEADAAN UMUM LOKALISASI PROSTITUSI DI PAYALABU | 14 |
| A. Pengertian Lokalisasi | 14 |
| B. Sejarah Lokalisasi Payalabu | 17 |
| C. Bentuk dan Sistem Pemakaian Lokalisasi | 18 |
| D. Keadaan Lingkungan Lokalisasi | 20 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | : TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA NOMOR 6 | |
| | TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN KESU- | |
| | SILAAN DI KABUPATEN KARIMUN | 23 |
| | A. Latar Belakang Lahirnya Perda No. 06 tahun | |
| | 2002 | 23 |
| | B. Isi Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran | |
| | Kesusilaan | 24 |
| | C. Kegunaan atau Manfaat Perda No. 06 Tahun 2002 | |
| | Tentang Pelanggaran Kesusilaan | 29 |
| BAB IV | : KENDALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN | |
| | KARIMUN DALAM PELAKSANAAN PERDA | |
| | NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN | |
| | KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI | |
| | PROSTITUSI DI PAYALABU MENURUT | |
| | HUKUM ISLAM | 31 |
| | A. Realita PSK di Lokalisasi Payalabu | 31 |
| | B. Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 di Kabupaten | |
| | Karimun | 39 |
| | C. Kendala Pemda Kab. Karimun dalam Pelaksanaan | |
| | Perda No. 06 tahun 2002 Tentang Pelanggaran | |
| | Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi | |
| | di Payalabu | 50 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| | D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kendala Pemda Kabupaten Karimun Dalam Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002, dalam Menanggulangi Prostitusi | 57 |
| BAB V | : KESIMPULAN DAN SARAN | 78 |
| | A. Kesimpulan | 78 |
| | B. Saran-saran | 80 |

DAFTAR FUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kabupaten Karimun perkembangan pelacuran muncul di mana-mana, baik di Hotel maupun di tempat hiburan lainnya. Di samping itu Kabupaten Karimun juga mempunyai lokasi prostitusi yang disebut lokalisasi Payalabu. Lokalisasi Payalabu adalah salah satu tempat Wanita Tuna Susila (WTS) yang ada di Desa Pangke Kecamatan Meral RT 01 / RW 01 Kabupaten Karimun, yang mana tempat tersebut berada jauh di daerah sudut kota yang berawa-rawa dan seperti hutan. Dengan jumlah WTSnya berjumlah lebih kurang 200 orang.¹

Dilihat dari perjalanan sejarah kehidupan umat manusia yang sampai sekarang, prostitusi selalu menjadi bahan kajian yang tidak terselesaikan. Baik ditinjau dari segi hukum dan hiburan hingga ia menjadi suatu kebutuhan yang dianggap lumrah. Tapi pada umumnya ia tetap menjadi keperihatinan masyarakat sosial, karena di dalam berbagai ajaran agama jelas dilarang terutama dalam agama Islam (Al-qur'an dan Sunnah) yang jelas-jelas memberikan sanksi kepada pelaku zina.

Konsepsi masyarakat pada umumnya tentang prostitusi dianggap sebagai tindakan a-moral, bahkan dianggap sebagai perbuatan kriminal, bertolak dari pandangan bahwa prostitusi bertentangan dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Di Indonesia tidak satupun peraturan ataupun KUHP tentang larangan promikuitas dan prostitusi. Prostitusi hanya dilarang jika itu hanya menyangkut pada pasangan yang sudah menikah dikenal dengan

¹. Sensissawa , Kadinsos Kab.Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, Tanggal 24 Oktober 2008.

pasangan perzinahan (pasal 284 KUHP) dan perdagangan perempuan dan anak-anak dibawah umur (pasal 287).²

Kalau ditelusuri ke belakang dan mencari sebab-sebab prostitusi sangat berentet panjang. Dapat dilihat selama ini faktor yang mempengaruhi wanita-wanita itu menjadi WTS, karena minimnya pendidikan atau bahkan tidak pernah menginjak bangku sekolah, dan dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mendukung untuk ikut dalam pendidikan sekolah. Bahkan untuk menyambung kehidupan anak dan keluarga, mereka juga tidak mempunyai pilihan lain, sehingga orang tua langsung memperkerjakan anaknya yang dibawah umur. Karena tidak ada lagi pilihan yang lain mereka sanggup untuk mencari kehidupan yang paling buruk menurut pandangan agama, sosial dan moral yaitu sebagai pelacur atau wanita tuna susila (WTS). Dan sekarang digunakan bahasa hukum Pekerja Sex Komersial (PSK).³

Pada kenyataannya salah satu faktor berkembangnya prostitusi disuatu daerah kota maupun kabupaten, disebabkan pemerintah memfasilitasi suburnya praktek prostitusi dan perdagangan perempuan baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi. Misalnya melalui fasilitas industri sex dan bentuk-bentuk *dating servis* yang terangkum dalam pengembangan industri pariwisata yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan devisa negara. Pemerintah memprogramkan lokalisasi atau dengan istilah sopan resosialisasi wanita tuna susila (tidak berarti dan tidak berupa apa-apa).⁴

² R. Soenarto Soerodibroto, S.H, *KUHP*, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet ke-5, Hal. 173

³ Tabloid Semai, *Ditutupnya Lokalisasi WTS.*, (Jakarta : Koalisi Perempuan Indonesia 2000), cet ke- 7, Hal. 13

⁴ Tabloid Semai, *ibid*, Hal 15.

Berkembangnya prostitusi di Kabupaten Karimun sudah ada sejak tahun 1970.⁵ Lokasi prostitusi yang pertama kali adalah di Kampung Pelipit di pertokoan Wak Kelong, Nama toko itu dikenal karena pemiliknya bernama kelong. Waktu itu tamu-tamu yang datang ke Karimun, umumnya nelayan-nelayan yang singgah di Karimun.

Mendapat protes dari masyarakat, lokasi dipindahkan ke Kali Baru, berjarak satu kilometer dari Pelipit yang pada waktu itu penduduknya hanya puluhan ribu orang. Setelah di Karimun berdiri PT. Timah di Teluk Uma, perkembangan prostitusipun meningkat. Para pengelola prostitusi mulai mendirikan rumah-rumah pelacuran untuk menampung tamu-tamu yang datang berkunjung. Karena itulah, masyarakat kembali bereaksi.

Ibu-ibu di Karimun akhirnya protes dan minta supaya dipindahkan hingga akhirnya protes dan minta supaya dipindahkan hingga akhirnya dibuat kebijakan melokalisasi para pekerja sex ini di Payalabu. Sejak itulah, setiap pendatang yang menjadi pekerja sex komersial ditempatkan di Payalabu.

Di Indonesia ada beberapa daerah yang menangani masalah prostitusi dengan membuat Perda (Peraturan Daerah) seperti Bandung, Jakarta, Surakarta, Semarang dan lain-lain. Hal ini bermakna untuk kejelasan suatu lokasi tempat prostitusi sebelum adanya tindakan lebih lanjut, serta berguna untuk memudahkan rehabilitasi dari pemerintah. Dengan adanya Perda tentang prostitusi ini, akan lebih menegaskan “harus” adanya perhatian, tindakan pemerintah kota atau daerah untuk mengumpulkan WTS untuk tidak berkeliaran di tengah kota.

⁵ H. Bahrum Ali, Mantan Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Karimun, *wawancara*, Tanjung Balalai Karimun, 17 Maret 2009.

Sedangkan kalau tidak adanya Perda itu makin marak berkembangannya, berkeliaran para WTS yang berada di tengah kota dan itu jelas akan mengganggu keamanan secara umum. Dan bahkan tidak ada suatu kewajiban yang menekan Pemerintah Daerah yang berwenang secara hukum untuk benar-benar meresponi masalah pelacuran (prostitusi) karena bagaimanapun pelacuran itu merupakan penyakit yang turun temurun sampai kini dan ada di daerah mana pun.

Di Kabupaten Karimun pemerintah setempat tidak memberikan izin lokasi prostitusi, dan tidak pula membiarkan perkembangan prostitusi tersebut. Dimana prostitusi tersebut tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Walaupun demikian pemerintah Kabupaten Karimun melalui Perda (Peraturan Daerah) nomor 06 tahun 2002 telah mengatur tentang pelanggaran kesusilaan terhadap lokalisasi prostitusi di payalabu. Dan Pemerintah daerah Kabupaten Karimun terutama Dinas Sosial dalam menangani lokalisasi Prostitusi, juga bekerja sama dengan Depkes dan bantuan dari LSM dalam penyuluhan HIV/AIDS (kesehatan).

Setiap rumah di daerah lokasi Payalabu itu dikoordinir oleh satu orang kepala rumah tangga yang dikenal dengan sebutan Mami, atau Germo. Dan pada akhirnya dijadikan sebagai tempat yang dianggap legal (dilokalisasi). Karena setiap pondok atau rumah tempat tinggal para WTS tersebut ada peraturan dari pihak pemerintah (Polsek) seperti masalah keamanan, dan peraturan dari Mami atau Germo selaku kepala keluarga dilokasi tersebut. Adapun peraturannya adalah, dimana Wanita Tuna Susila (WTS) tersebut tidak boleh keluar dari lokalisasi, dan apabila ada pelanggan yang ingin membawa WTS tersebut keluar dari lokalisasi maka pelanggan tersebut harus meninggalkan identitas dan uang jaminan kepada Mami atau Germo selaku kepala keluarga . WTS yang berada di dalam lokalisasi tersebut mendapatkan jaminan keamanan (keselamatan diri dari pemerasan), sedangkan yang berada diluar areal, tidak mendapatkan jaminan apapun. Pada daerah lokalisasi itu dibuat tanda

(portal) berupa gapura (pintu gerbang) guna menandakan bahwa sudah masuk pada daerah kawasan pelacuran.

Islam memandang prostitusi itu adalah sarana yang menyebabkan terjadinya perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan QS. al-Isra ayat 32 yang berbunyi :



Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”*.⁶

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) tersebut seharusnya Pemerintah Kabupaten Karimun dapat mengatasi Prostitusi dengan baik, dan bagi umat Islam baik secara pribadi atau kelembagaan tidak dibolehkan memfasilitasi perzinaan. Namun pada kenyataannya pihak pemerintah disatu sisi tidak dapat menjalankan dengan sempurna Perda (Peraturan Daerah) No. 06 Tahun 2002 tersebut, seperti pada bunyi pasal-pasal berikut dibawah ini :

Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 (Ketentuan Larangan) yang terdiri dari :

1. Dalam Daerah Kabupaten Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran Kesusilaan
2. Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
 - a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi

⁶ Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 285.

- c. Menyediakan tempat, dan, mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum
 - e. Mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesopanan
3. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran Kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 3 ayat 1 (Ketentuan Penindakan) yang terdiri dari :

- 1. Pemerintah daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk Pelanggaran Kesusilaan

Pasal 4 (Ketentuan Pidana) yang terdiri dari :

- 1. Barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 8 :

- 1. Usaha Represif dimaksud untuk mengurangi dan atau meniadakan tindakan Pelanggaran Kesusilaan
- 2. Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Razia
 - b. Penampungan sementara untuk seleksi
 - c. Pelimpahan

Pasal 9 :

Pelaku Pelanggaran Kesusilaan yang Razia ditampung dalam penampungan sementara untuk di seleksi.

Yang mana pasal-pasal tersebut di atas belum dapat dengan sepenuhnya dijalankan, yang mana dilain pihak mereka bertanggung jawab menanggulangi masalah sosial di antaranya prostitusi.

Berangkat dari latar belakang inilah penulis berkeinginan mengangkat permasalahan dengan judul **“Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Terhadap Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi Di Payalabu Menurut Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Realita PSK Di Lokalisasi Payalabu ?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 di Kabupaten Karimun?
- c. Apa Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terhadap pelaksanaan Perda No 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi di Payalabu.
- d. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam menjalankan Perda No.06 Tahun.2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Prostitusi di Kabupaten Karimun (Lokalisasi Payalabu).

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian lapangan ini, penulis akan memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menyelidiki tentang Apa

Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002, yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan Pekat (Penyakit Masyarakat), menangani masalah Prostitusi Lokalisasi Payalabu sejak 2003 – 2008 ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Peneliti

Adapun tujuan penelitian ini ialah :

- a) Untuk mengetahui realita PSK dilokalisasi Payalabu.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 di Kabupaten Karimun.
- c) Untuk mengetahui apa kendala Pemerintah Karimun dalam pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.
- d) Untuk mengetahui apa tinjauan hukum Islam terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.

2. Kegunaan Peneliti

- a. Memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan.
- b. Memberikan informasi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kab. Karimun serta memperlihatkan kendala yang terjadi dilapangan selanjutnya kebijakan yang akan datang dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
- c. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dilokasi Payalabu Kelurahan Pangke Kecamatan Meral RT 01 / RW 01, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

2. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kab. Karimun yang terdiri dari instansi-instansi yang diberi wewenang didalam melaksanakan Perda No. 06 tahun 2002 yang terdiri dari Instansi Kepolisian, Pol PP, dan Dinsos sebanyak 60 orang, PSK 200 orang, Germo berjumlah 8 orang dengan demikian jumlah populasi sebanyak 268 orang.

Untuk sampel penelitian ,

- a. Pemerintah Kab. Karimun (Kapolres, Sat Pol PP, dan Dinsos) 60 orang, diambil 5 % dengan jumlah sebanyak 3 orang.
- b. PSK sebanyak 200 orang, diambil 10 % (20 orang) diambil dengan random sampling.
- c. Germo / Mami, karena jumlahnya sedikit diambil seluruhnya yaitu sebanyak 8 orang.

Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 31 orang.

3. Subjek dan Objek

- a. *Subjek* peneliti ini adalah Badan satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP), Kapolres Tanjung Balai Karimun sebagai penegak Perda, dan Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Sosial sebagai Instansi yang menangani masalah sosial, para PSK serta Mami / Germo.
- b. *Objek* penelitian ini adalah Kendala Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap pelaksanaan Perda No.06 Tahun.2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi Payalabu menurut Hukum Islam.

1. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu, Dinsos, Pol. PP dan Kapolres.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemuka masyarakat, Para PSK dan tokoh ulama (MUI) dari masyarakat yang tinggal di daerah lokasi Payalabu, dokumen-dokumen, data-data yang tersedia di kantor yang berhubungan dengan penelitian serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Alat Pengumpulan Data

Adapun cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah

:

- a. Wawancara, Yaitu dengan melaksanakan wawancara terpimpin yang mendalam, terarah dengan responden untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diteliti.
- b. Observasi, Yaitu mengadakan pengamatan langsung fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan lokasi prostitusi, dan Kendala Pelaksanaan PERDA (Peraturan daerah) No. 06 Tahun 2002.
- c. Angket, Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan secara tertulis kemudian disebarkan kepada responden (PSK) untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang tersedia.

3. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan akan dianalisa secara deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. Apabila data telah terkumpul, maka di klasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu : data kualitatif dan

data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisahkan secara kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang persentase.

4. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul lalu diadakan pembahasan terhadap data tersebut dengan mengunakan sebagai berikut :

- a. Deskriptik analitik, yaitu menggambarkan secara tepat data-data kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum, menguraikannya kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yang menguraikan data-data yang khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami tulisan ini, penyusunan diatur sedemikian rupa dengan membaginya beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa pasal.

Pada Bab I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Adanya Subjek dan Objek sumber data, Pengumpulan Data kemudian Analisa Data, Metode Penulisan Dan terakhir Sistematika Penulisan.

Bab II Tentang Tinjauan Umum Lokalisasi, Pengertian, Sejarah Lokalisasi Payalabu, Jumlah Lokalisasi dan Pemakaian Lokalisasi Prostitusi di Payalabu.

Bab III Adalah Tinjauan Umum Tentang Perda No. 06 Tahun 2002, Tentang Pelanggaran Kesusilaan Di Kabupaten Karimun.

Bab IV Tentang Lokalisasi Prostitusi Membahas tentang Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Pelaksanaan Perda No.06 Tahun.2002, Terhadap Lokalisasi Prostitusi di Payalabu, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap adanya Lokalisasi Prostitusi.

Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

KEADAAN UMUM LOKALISASI PROSTITUSI

DI PAYALABU

A. Pengertian Lokalisasi

Dalam masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang perzinahan sudah ada dibumi Allah ini. Apakah itu berbentuk penjualan budak untuk digauli atau penjajahan terhadap perempuan atau perempuan sebagai penghibur hawa nafsu. Dari bahasa perempuan sebagai penghibur nafsu pelacur wanita tuna susila (WTS) sampai sekarang yang lebih diperhalus bahasa sebagai pekerja seks komersial (PSK).¹

Kalau melihat dilatar belakang begitu biasanya pekerjaan yang dianggap haram dan merusak moral (Prostitusi) menjadi suatu kebutuhan yang lumrah apatah lagi didunia yang modern sekarang. Pada bab ini penulis terlebih dahulu memberikan pengertian Prostitusi?

Pengertian umum prostitusi atau tuna susila adalah seorang wanita, pria dan wanita pria (waria) yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan jasa. Sedangkan lokalisasi tuna susila (rehabilitasi) adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan para WTS mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.²

Para ahli memberikan defenisi beraneka ragam tentang prostitusi atau pelacuran antara lain :

- a. Soedjono D. SH, mengatakan bahwa pelacur itu berasal dari bahasa latin "prostitutio" yang artinya sebagai pelaku terang-terangan menyerahkan diri pada perzinahan, sedangkan perzinahan itu sendiri berarti hubungan kelamin antara laki-laki dengan seorang perempuan, baik salah satu atau kedua-duanya telah terikat perkawinan yang sah dengan

¹ Tabloid Semai, *Ditutupnya Lokalisasi WTS*. (Jakarta. Koalisi Perempuan Indonesia.2000). hal. 13

². Departemen Sosial. *Pola Operasional Rehabilitasi sosial Tuna Susila*. (Jakarta) tt. Hal.

orang lain, selain dari mereka yang berperan dari adegan perzinahan itu. Atau dengan kata lain pelacuran itu berarti penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.³

- b. Paul Moediko Moelyono, menyatakan pelacuran adalah penjualan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak, guna pemeras nafsu seksual orang-orang itu.⁴
- c. George Ryley Scott, menyatakan bahwa pelacur adalah seorang laki-laki atau perempuan yang karena imbalan upah, baik berupa uang atau lainnya atau untuk kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya mengadakan hubungan kelamin yang sejenis atau dengan berbagai orang sejenis atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu.⁵
- d. P. J. d Bruine Van Amstel, menyatakan prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak lelaki dengan pembayaran. Defenisi diatas mengemukakan adanya unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus dengan banyak laki-laki.⁶
- e. Dr. Kartini Kartono, mengemukakan prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut :
 - 1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.

³ Soedjono D. SH, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Karya Nusantara, 197), Hal. 14

⁴ B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1982), Hal. 43

⁵ *Ibid*

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-7, Hal. 182-183

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat lacur antara laki-laki dan wanita yang bersama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar nikah saja, tetapi termasuk juga peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.⁷

Departemen Sosial RI, menyatakan bahwa pelacur adalah setiap perhubungan diluar perkawinan yang sah oleh satu pelakunya dijalankan dengan maksud mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁸

Didalam Peraturan Daerah No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Karimun menyatakan prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan.⁹

B. Sejarah Lokalisasi Payalabu

Lokalisasi Payalabu adalah salah satu tempat Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ada di Kecamatan Meral Desa Pangke Kabupaten Karimun. Pada awalnya lokasi prostitusi yang pertama kali adalah di Kampung Pelipit di pertokoan Wak Kelong. Nama toko itu dikenal karena pemiliknya bernama Kelong. Waktu itu, tamu-tamu yang datang ke Karimun, umumnya nelayan-nelayan yang singgah di Karimun. Mendapat protes dari masyarakat,

⁷. *Ibid*

⁸. *Ibid*

⁹. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2002 Tentang *Pelanggaran Kesusilaan* di Kabupaten Karimun, *loc. cit.*

lokasi dipindahkan ke Kali Baru, berjarak satu kilometer dari Pelipit, yang pada waktu itu penduduknya hanya puluhan ribu orang. Setelah di Karimun berdiri PT Timah di Teluk Uma, perkembangan prostitusi pun meningkat. Para pengelola prostitusi mulai mendirikan rumah-rumah pelacuran untuk menampung tamu-tamu yang datang berkunjung. Karena itulah, masyarakat kembali bereaksi. "Ibu-ibu di Karimun akhirnya protes dan minta supaya dipindahkan hingga akhirnya dibuat kebijakan melokalisasi para pekerja seks ini di Payalabu. Sejak itulah, setiap pendatang yang menjadi pekerja seks ditempatkan di Payalabu,"¹⁰

Setelah ramai PSK yang berpraktek, masyarakat pun mulai menempati daerah yang berbentuk semak dan hutan itu. Masyarakat hanya memberi batas kawasan prostitusi itu dengan portal dan gapura. Mereka yang tinggal dalam kawasan lokalisasi sama halnya dengan masyarakat yang ada diluar tersebut.

Dilokasi Payalabu banyaknya jumlah PSK yang ada \pm 200 orang, yang mana terdapat 20 buah rumah / vila tempat penampungan para PSK, dan disetiap rumah atau vila tersebut terdapat sebanyak \pm 20 orang PSK didalamnya. Setiap rumah atau vila dikoordinir oleh satu orang kepala rumah tangga yang disebut dengan Mami. Mami adalah nama sebutan lain dari germo. Germo inilah sebagai pimpinan PSK yang tinggal dilingkungan tersebut. Mereka juga mempunyai seorang RT dan RK yang mereka pilih sendiri, serta pemuka agama. RT dan RW diberi Surat Keterangan (SK) oleh Lurah Pangke untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai RT dan RW.¹¹

C. Bentuk dan Sistem Pemakaian Lokalisasi

1. Bentuk Lokasi Prostitusi Payalabu

¹⁰. H. Bahrum Ali, Mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, *wawancara*, Tanjung Balai karimun, 16 Februari 2009.

¹¹. Oli Lianto, RT. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, *wawancara*, Payalabu, 27 Mei 2009.

Letak geografis daerah Payalabu ini sangat jauh dari pusat kota Karimun. Dapat dikatakan sangat terpencil dari tengah kota dan mempunyai jarak tempuh yang sangat jauh dan luas lokasi Payalabu 1 Ha.

Tatanan dan bentuk rumah yang ada di dalam lokasi Payalabu ini sangat teratur rapi dan mempunyai luas dan lebar yang sama pada setiap rumah. Hal ini diatur oleh sipemilik tanah dengan menyesuaikan kepada kondisi bangunan. Didalam lokasi Payalabu mempunyai \pm 20 buah rumah atau vila tempat penampungan PSK seperti yang telah tertera di atas dan jalanan yang tidak beraspal.

2. Sistem Pemakaian Lokalisasi

Seperti yang mana telah dikatakan tadi dalam sejarah lokalisasi, bahwa lokasi yang ditempati para PSK itu adalah pemilik Mami (Germo) sebagai kepala keluarga dilokasi, yang mana mami (Germo) yang berkuasa atas pemilikan tanah dilokasi tersebut, dan dalam pengoprasian para PSK juga diataur oleh Mami (Germo), RT.

Para PSK apabila telah masuk ke dalam lokasi tersebut dapat dikatakan bahwa mereka sudah dibeli dari orang yang mengantarnya, maka ia harus mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku disana walaupun sebenarnya banyak aturan itu sendiri sangat merugikan mereka dalam bekerja. Dan calon PSK yang berkeinginan untuk menetap disana haruslah orang luar dari pulau Karimun.¹²

Mami / Germolah yang membayar para calo-calo yang membawa PSK ke lokasi Payalabu. Sedangkan jam kerja mereka itu setiap waktu apabila datang tamu (Konsumen) para lelaki hidung belang, maka mereka harus melayani dengan baik, dan bayarannya tidaklah langsung diberikan kepada PSK tetapi mereka harus membayar kepada Mami

¹² . Mami Darsih, Mami (Germo), *wawancara*, payalabu, 27 Mei 2009.

sebagai ibu dalam rumah tangganya. Dan apabila tamu tersebut berkeinginan membawa PSK itu keluar dari lokasi Payalabu seperti membawa PSK tersebut ke Hotel atau Wisma, maka para lelaki hidung belang (Konsumen) tersebut harus meninggalkan tanda pengenalnya kepada Mami dan Bapak RT untuk menjamin keselamatan para anggotanya. Dan tentunya apabila mereka (PSK) harus mendapatkan tambahan biaya (fee) atau uang samping dari tamu yang membawanya maka mereka boleh untuk menyimpannya. Seluruh atauran terutama harga layanan di dalam satu rumah semuanya sama, yang dimulai dengan harga sekali pemakaian atau main sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) dan ada yang seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun apabila ada tamu yang bermain dan bermalam nginap di lokasi maka harga bisa mencapai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).¹³

D. Keadaan Lingkungan Lokalisasi

Adapun keadaan lokasi di payalabu tersebut yang dapat saya gambarkan sebagai penulis adalah, dimana di lokasi tersebut banyak masyarakat dan anak-anak yang berkeliruan di daerah itu dan tidak tampak kecemasan orang tua mereka untuk menjauhi anak mereka dari lingkungan tersebut.

Dilokasi tersebut juga didirikan bangunan sarana ibadah dan pendidikan serta poliklinik (puskesmas), semuanya khusus disediakan buat para PSK dan para tamu. Dan PSK juga telah mendapatkan bimbingan, berupa pengajian masalah agama, kesehatan seperti penyuluhan HIV/AIDS dan kebersihan lingkungan.

Dimana PSK tersebut disaat penulis mewawancarai mereka masalah ibadah, ternyata mereka juga melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan bahkan setiap minggu PSK tersebut melakukan wirid pengajian Islam, dan bagi pelanggan juga dapat melaksanakan sholat. Karena

¹³. Yanti, salah seorang PSK di lokasi Payalabu, *wawancara*, payalabu, 27 Mei 2009.

disana 85 % penduduknya beragama Islam maka dilokasi tersebut dibangun satu musolah atau masjid.

Dalam bidang kesehatan mereka selalu dikunjungi oleh Dinsos (Dinas Sosial Kab. Karimun) dan Yayasan Kasih Puan sekali dalam seminggu. PSK di lokasi Payalabu mendapat perhatian dari LSM, Dinsos, dan Yayasan Kasih Puan dalam hal penyuluhan anti penyakit HIV/AIDS. Sehingga di sana disediakan poliklinik sebagai tempat pengobatan, baik pengobatan biasa maupun pembagian alat-alat kontrasepsi bahkan kawasan tersebut diwajibkan bagi para tamu dan PSK itu sendiri untuk memakai kondom apabila melakukan hubungan badan.

Bagi mereka para PSK yang beragama Islam, mereka senantiasa mengingatkan diri mereka kepada Allah dengan melaksanakan solat lima waktu dan membaca Al-Quran bahkan yasinan setiap malam jum'at, di rumah / vila tempat penampungan mereka, dan ada juga yang meninggalkan sepenuhnya karena latar belakang PSK di lokalisasi tersebut sangat beragam, diantaranya :

1. Karena faktor ekonomi
2. Karena putus asa dalam bercinta, dan
3. Karena tertipu dengan cara diimingi kerja keluar negeri.¹⁴

Berikut ini data penduduk PSK dilokalisasi Payalabu mulai tahun 2004-2008.

Tabel. 1.1
Data Jumlah PSK Dilokasi Payalabu
Sejak Tahun 2004 – 2008

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|-----------|
| 1. | 2004 | 200 Orang |
| 2. | 2005 | 250 Orang |

¹⁴. Ani, PSK di lokasi payalabu, *wawancara*, payalabu, 27 Mei 2009.

| | | |
|----|------|-----------|
| 3. | 2006 | 315 Orang |
| 4. | 2007 | 350 Orang |
| 5. | 2008 | 400 Orang |

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karimun, 2007.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah PSK di Kabupaten Karimun semakin bertambah. Hal ini seyongnyanya mendapat perhatian dari semua lapisan yang ada dalam masyarakat, terutama pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos). Data ini menunjukkan jumlah PSK yang berada dilokasi Payalabu semakin membesar dan keberadaan para PSK itu silih berganti namun ada yang bertempat tinggal cukup lama (bertahun-tahun).

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PERDA NOMOR 06
TAHUN 2002, TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN
DI KABUPATEN KARIMUN

A. Latar Belakang Lahirnya Perda No. 06 Tahun 2002

Adapun yang menjadi latar belakang terbentuknya Perda No. 06 tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Kondisi dan situasi sosial masyarakat.

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kota Tanjung Balai Karimun akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri berkaitan dengan semakin maraknya peraktek-peraktek prostitusi / pelacuran di karimun yang berdampak negatif terhadap moral atau mental kualitas fisik dan untuk kepentingan keamanan dan ketentraman dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dalam permasalahan-permasalahan pelanggaran kesusilaan sehingga dipandang perlu adanya penertiban dengan mengeluarkan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan tersebut.

2. Masalah Otonomi Daerah

Dengan adanya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan¹. Dengan adanya kewenangan yang diberikan pada daerah inilah yang memberikan peluang setiap daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerahnya termasuk juga pemerintah Kabupaten Karimun².

B. Isi Perda Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

1. Ketentuan Umum

Pasal 1 yang terdiri dari :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Karimun
- 2) Kepala Daerah adalah Bupati Karimun
- 3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
- 5) Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun
- 6) Pelanggaran Kesusilaan adalah segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dengan sengaja dilakukan dimuka umum yang dapat merusak kesopanan utamanya berkaitan dengan kegiatan prostitusi
- 7) Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan
- 8) Rehabilitasi Sosial Kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggaran kesusilaan, agar mampu kembali

¹. Tim redaksi, *Pemerintah Daerah UU. No. Tahun 2004 Beserta Penjelasannya*, (Jakarta : Ramdina Prakarsa, 2004), Hal. 4.

². Muslim. SH, Kabag Hukum Kab. Karimun , *wawancara*, Tanjung Balai Karimun 25 Mei 2009.

melaksanakan fungsi social secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Ketentuan Larangan

Pasal 2 yang terdiri dari :

- 1) Dalam Daerah Kabupaten Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran Kesusilaan
- 2) Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
 - a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - c. Menyediakan tempat, dan, mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum
 - e. Mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesopanan
- 3) Membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran Kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

3. Ketentuan Penindakan

Pasal 3 yang terdiri dari :

- 1). Pemerintah daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk Pelanggaran Kesusilaan
- 2). Penanggung Jawab dan atau pemilik tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dilarang melakukan kegiatan usahanya sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah Daerah atau pihak berwenang.

4. Ketentuan Pidana

Pasal 4 yang terdiri dari :

- 1). Barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

5. Penyidikan

Pasal 5 yang terdiri dari :

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Kesusilaan
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
 - c. Berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

- d. Melakukan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. Mengadakan penghentian atas penyidikan setelah dinyatakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi kewenangannya.

6. Pembinaan

Pasal 6 yang terdiri dari :

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Karimun melalui usaha Preventif, Represif dan Rehabilitatif.

Pasal 7 :

- 1) Usaha Preventif dimaksud untuk mencegah timbulnya Pelanggaran Kesusilaan dalam masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Masalah Tuna Susila.
- 2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan antara lain dengan :
 - a. Penyuluhan dan Bimbingan Keagamaan
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - c. Pembinaan Sosial
 - d. Peningkatan Derajat Kesehatan

Pasal 8 :

- 1). Usaha Represif dimaksud untuk mengurangi dan atau meniadakan tindakan Pelanggaran Kesusilaan
- 2). Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Razia
 - b. Penampungan sementara untuk seleksi
 - c. Pelimpahan
- 3) Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku
- 4). Razia dapat juga dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang terbatas dan dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian

Pasal 9 :

Pelaku Pelanggaran Kesusilaan yang Razia ditampung dalam penampungan sementara untuk di seleksi.

Pasal 10 :

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimaksud untuk menetapkan kualifikasi para Pelanggaran Kesusilaan dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan Rehabilitatif selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Dilepaskan dengan syarat
- b. Dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)
- c. Dikembalikan kepada Keluarga
- d. Diserahkan ke Pengadilan.³

³. Peraturan daerah No. 06 Tahun 2002 Tentang *Pelanggaran Kesusilaan di Kabupaten Karimun..*

C. Kegunaan atau Manfaat Perda nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pelanggaran kesusilaan.

Sejalan dengan lajunya pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kabupaten Karimun pada umumnya, khususnya kota Tanjung Balai Karimun akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan semakin maraknya praktek-praktek prostitusi / pelacuran di karimun yang berdampak negatif terhadap moral atau mental kualitas fisik dan untuk kepentingan keamanan dan ketentraman dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dalam permasalahan permasalahan pelanggaran kesusilaan sehingga dipandang perlu adanya penertiban dengan mengeluarkan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan tersebut.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka mencegah, penertiban, penghapusan praktek-praktek prostitusi / pelacuran baik secara terang-terangan maupun terselubung. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek prostitusi / pelacuran maupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Norma Hukum dan Norma Kesusilaan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keamanan, ketertiban masyarakat dan martabat bangsa yang baik.⁴

⁴. Bapak Muslim, PLHK Kabag Hukum Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 25 Mei 2009.

BAB IV

**KENDALA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM
PELAKSANAAN PERDA NO. 06 TAHUN 2002 TENTANG PELANGGARAN
KESUSILAAN TERHADAP LOKALISASI PROSTITUSI DIPAYALABU MENURUT
HUKUM ISLAM**

A. Realita PSK Di Lokalisasi Payalabu

Bila ditinjau dari hasil wawancara Penulis dengan salah satu Germo / Mami dilokasi Payalabu tersebut, mereka mengatakan bahwa tidak adanya peranan Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) yang benar-benar dibutuhkan para PSK untuk merubah keadaan lokasi dan para anggotanya. Dan dapat juga dilihat keberadaan Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) tidak ada bersosialisasi atau turun kelapangan untuk memberikan pengarahan, pembinaan, pelatihan keterampilan yang sungguh-sungguh dan semuanya hanya tergantung kepada keinginan Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) semata.¹

Disini Penulis membuat beberapa pertanyaan yang menyangkut peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos). Terlebih dahulu pertanyaan angket yang dibuat penulis yaitu berapa lama responden berada dilokalisasi Payalabu.

Tabel 2.1
Biodata Responden (PSK Lama bekerja Dilokalisasi)

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|----|--------------------|--------|------------------|
|----|--------------------|--------|------------------|

¹. Darsih, Mami / Germo, *wawancara*, Payalabu, 27 Mei 2009.

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|------------|
| A. | 1 – 2 Tahun | 16 | 80 |
| B. | 2 – 3 Tahun | 2 | 10 |
| C. | 3 Tahun Lebih | 2 | 10 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan lama mereka bekerja dilokasi : 1 – 2 tahun sebanyak 16 orang (80 %), 2 – 3 tahun sebanyak 2 orang (10 %) dan 3 tahun lebih sebanyak 2 orang (10 %).

Untuk dapat mengetahui penyebab sehingga para PSK berada dilokasi tersebut dan sudah menjadi profesinya, penulis juga membuat pertanyaan angket seperti di bawah ini :

Tabel 2.2
Latar Belakang Berada Dilokalisasi

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Karena Tertipu | 6 | 30 |
| B. | Karena Ekonomi | 9 | 45 |
| C. | Karena Kecewa | 5 | 25 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari hasil tabel di atas bahwa kebanyakan para PSK yang berada di lokasi Payalabu itu menyatakan : faktor tertipu berjumlah 6 orang (30 %), faktor ekonomi berjumlah 9 orang (45 %) dan faktor kecewa sebanyak 5 orang (25 %).

Dan untuk mengetahui berapa penghasilan para PSK yang berada dilokasi Payalabu selama beberapa bulan, dan apakah ini lebih baik dari pada PSK yang berkeliaran ditengah kota (Pelacur Jalanan). Tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 2.3
Penghasilan PSK Rata-Rata Perbulan

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | 200.000 – 400.000 | 7 | 35 |
| B. | 500.000 – 600.000 | 12 | 60 |
| C. | 1.000.000 - Lebih | 1 | 5 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari tabel di atas dapat kita lihat persentase bahwa para PSK yang bekerja dilokasi penghasilan bersih selama sebulan yang dikoordinir oleh seorang geromo / mami mendapatkan : Rp. 200.000 – Rp. 300.000 berjumlah 7 orang (35 %) sebulan, dari Rp. 500.000 – Rp. 600.000 berjumlah 12 orang (60 %), dan untuk pendapatan diatas 1.000.000 lebih berjumlah 1 orang (5 %).

Dari lokasi tersebut para PSK mendapat jaminan keamanan yang datangnya dari pos penjagaan kepolisian yang ada didesa pangke dan begitu juga dalam bidang kesehatan terutama penanganan masalah penyakit HIV / AIDS. Yang mana ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kab. Karimun yang bergerak dibidang penyuluhan HIV / AIDS. Untuk melihat persentasenya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Jaminan Keamanan dan Kesehatan Serta Keselamatan PSK Dilokalisasi

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sangat Terjamin | 20 | 100 |
| B. | Kurang Terjamin | - | - |
| C. | Tidak Terjamin | - | - |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari tabel di atas tampak bahwa dalam bidang keamanan dan kesehatan bagi para PSK itu sendiri dinilai cukup baik sehingga hasil dari pernyataan responden yang berjumlah 20 orang (100 %) terjamin keamanan dan kesehatannya. Dari segi kesehatan, dikarenakan adanya Depkes dan bantuan LSM serta yayasan yang turun ke lapangan 2 kali dalam seminggu. Untuk memberikan pengobatan (pencegahan penyakit) kepada para PSK (terutama masalah HIV / AIDS).

Lokasi Payalabu itu sangat berdekatan dengan masyarakat biasa dan para PSK yang berada di lokasi Payalabu. Dan penulis membuat angket tentang tanggapan masyarakat terhadap lokasi dan angket tersebut diisi responden dari PSK. Lihat tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 2.5
Tanggapan Masyarakat Sekitar Lokalisasi Terhadap PSK

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Prihatin | 4 | 20 |
| B. | Biasa-biasa Saja | 15 | 75 |
| C. | Sinis | 1 | 5 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap lokasi itu sendiri, para PSK menyatakan : prihatin 4 orang (20 %), sedangkan sikap biasa terhadap PSK 15 orang (75 %), dan memandang mereka dengan sinis 1 orang (5 %).

Untuk dapat mengetahui apakah peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) itu sampai kepada para PSK untuk menjadi perubahan bagi mereka, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) Dalam Memberikan

Penyuluhan Pencegahan Penyakit HIV / AIDS

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sangat Berperan | 12 | 60 |
| B. | Kurang Berperan | 3 | 15 |
| C. | Tidak Berperan | 5 | 25 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Pada tabel di atas peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) untuk penyuluhan tentang penyakit HIV / AIDS : sangat berperan 12 orang (60 %), sedangkan kurang berperan 3 orang (15 %), dan tidak berperan sama sekali 5 orang (25 %).

Dalam memberikan pembinaan serta penyuluhan keagamaan terhadap PSK itu sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 2.7
Perhatian Dinas Sosial Terhadap PSK

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sangat Baik | 6 | 30 |
| B. | Kurang Baik | 11 | 55 |
| C. | Tidak Baik | 3 | 15 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari hasil persentase pada tabel 6 di atas tampak peran Dinsos dalam jawaban alternatif : sangat baik 6 orang (30 %), kurang baik 11 orang (55 %), sedangkan tidak baik 3 orang (15 %).

Dan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) dalam memberikan keterampilan untuk para PSK agar meninggalkan tempat (profesinya) prostitusi itu. Dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.8
Bagaimana Pemda Kab. Karimun (Dinsos) Dalam Pembinaan Keterampilan Agar Dapat Meninggalkan Lokalisasi (profesi PSK)

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sangat Membantu | 7 | 35 |
| B. | Kurang Membantu | 4 | 20 |
| C. | Tidak Membantu | 9 | 45 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari jawaban tabel di atas yang dapat kita lihat bahwa peran Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) dalam melakukan pembinaan keterampilan agar dapat meninggalkan lokasi : sangat membantu 7 orang (35 %), kurang membantu 4 orang (20 %), dan dirasakan tidak membantu 9 orang (45 %). Pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal memberikan bantuan yang sifatnya material untuk menjadi modal bagi mereka yang ingin keluar dari dunia yang nista. Lihat tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.9
Bantuan Pemda Kab. Karimun (Dinsos) Berbentuk Material Agar Responden Meninggalkan Profesinya

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sering | 10 | 50 |
| B. | Kadang-kadang | 4 | 20 |
| C. | Tidak Ada | 6 | 30 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari hasil tabel di atas kita lihat bahwa alternatif jawaban yang mengatakan sering Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) memberikan bantuan materil : sering 10 orang (50 %), kadang-kadang 4 orang (20 %), dan tidak ada 6 orang (30 %). Dari jawaban tersebut 10 orang (50 %) menyatakan sering Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) memberikan bantuan. Namun juga kendala bagi Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) untuk menyediakan peralatan yang mereka butuhkan sebagai modal, misalnya saja alat salon. Karena mereka lebih sering memberikan bantuan (yang bersifat pertolongan) jika terkena musibah seperti kebakaran.²

Dalam masalah bidang kerohanian apakah Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) juga ikut berperan. Lihat tabel berikut di bawah ini.

Tabel 2.10
Dalam Bidang Kerohanian Adakah Peran
Pemda Kab. Karimun (Dinsos)

| No | Alternatif Jawaban | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|
| A. | Sering | 9 | 45 |
| B. | Kadang-kadang | 1 | 5 |
| C. | Tidak Pernah | 10 | 50 |
| Jumlah | | 20 | 100 |

Dari jawaban alternatif di atas, responden yang menyatakan sering 9 orang (45 %), kadang-kadang 1 orang (5 %), dan tidak pernah 10 orang (50 %). Dari jumlah PSK bahwa yang lebih dominan dari jawaban tersebut adalah tidak pernah 10 orang atau 50 %.

Dari semua tabel yang menggambarkan tentang peran Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) terhadap lokalisasi prostitusi di Payalabu dapat direkapitulasi sebagai berikut :

² . Agus, Staf Dinas Sosial Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 24 Oktober 2009.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Tabel 1 – 10

| No | Alternatif | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|--------------|------------|------------------|
| 1. | Alternatif A | 97 | 48.5 |
| 2. | Alternatif B | 61 | 30.5 |
| 3. | Alternatif C | 42 | 21 |
| Jumlah | | 200 | 100 |

Berdasarkan perbandingan alternatif jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa kurang dari 50 % Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) berperan dalam menanggulangi permasalahan prostitusi di lokasi Payalabu.

B. Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 di Kabupaten Karimun

Dalam permasalahan prostitusi atau pelacuran yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dan dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya, karena begitu besarnya dampak negatif yang dirasakan masyarakat terhadap perbuatan tersebut baik itu moral atau mental maupun kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Karimun kegiatan prostitusi atau pelacuran sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat yang tidak menginginkan kegiatan tersebut. Hal ini sering terjadi dikarenakan beberapa faktor baik karena letaknya geografis daerah kabupaten karimun yang letaknya dianatra kota Batam, Singapura dan Malaysia ini menjadi daerah karimun sebagai tempat strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian seperti pariwisata dan tidak jarang terjadinya kegiatan protitusi, maupun faktor karena kurang siapnya masyarakat dalam menerima perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Keadaan akan menimbulkan

berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam masyarakat dan salah satunya kegiatan prostitusi.

Dengan sering terjadinya kegiatan prostitusi di Kabupaten Karimun dan khawatir terhadap akibat buruk yang akan dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah Kabupaten Karimun dan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun membuat peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum didalam masyarakat dan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah didalam penegakkan Perda yaitu melakukan penertiban prostitusi dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya bisa dilihat dibawah ini.

1. Prosedur Pelaksanaannya

Sesuai dengan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terhadap ketentuan larangan pasal 2 Ayat (1) dalam Daerah Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran kesusilaan, Ayat (2) Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku bagi siapapun yang karena perbuatannya, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :

- a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu melakukan kegiatan prostitusi.
- b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi.
- c. Menyediakan tempat dan mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi

Dan terhadap pembina pasal 6 pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam wilayah karimun melalui usaha

Preventif, Refresif Dan Rehabilitatif, maka dengan ketentuan peraturan daerah tersebut diatas, maka pemerintah daerah melaksanakan penertiban protitusi dengan cara lain :

a) Melaksanakan Razia

Razia merupakan salah satu usaha refresif yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi, dan meniadakan tindakan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan protitusi di lokalisasi Payalabu Tanjung Balai Karimun, razia ini dilaksanakan oleh pejabat yang diberi wewenang seprti kepolisian dan satuan polisi pamong praja dan di laksanakan sewaktu waktu.

Razia ini dilakukan ditempat-tempat yang diduga terjadi pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan protitusi seperti tempat lokasi payalabu, penginapan atau hotel, tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, tempat salon kecantikan yang sering disediakan oleh pemilik tempat, begitu juga dijalan-jalan raya atau umum yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi seks.

Razia ini dilakukan untuk menjaring atau menangkap para pelaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kegiatan prostitusi Di Tanjung Balai Karimun, dan dari hasil data analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khusus tentang penanggulangan perda kesusilaan No. 06 tahun 2002 Kabupaten Karimun dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum terutama penanganan prostitusi sepanjang tahun 2006 telah diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Data Hasil Razia Pekerja Seks Komersial Pada
Tahun 2007 Di Kab. Karimun

| No | Bulan | Jumlah PSK |
|---------------|--------------|-------------------|
| 1 | Januari | 19 Orang |
| 2 | Februari | 10 Orang |
| 3 | Maret | 13 Orang |
| 4 | April | 9 Orang |
| 5 | Mei | 8 Orang |
| 6 | Juni | 15 Orang |
| 7 | Juli | 11 Orang |
| 8 | Agustus | 15 Orang |
| 9 | September | 23 Orang |
| 10 | Oktober | 25 Orang |
| 11 | November | 27 Orang |
| 12 | Desember | 25 Orang |
| Jumlah | | 200 Orang |

Sumber : SAT POL PP Kab. Karimun, 2007

Tabel tersebut di atas menggambarkan hasil operasi penertiban yang dilakukan sepanjang tahun 2006 sebanyak 200 orang PSK yang terjaring dalam razia.

Sedangkan prosedur atau tatacara pelaksanaan razia yang dilakukan pejabat yang berwenang dilapangan antara lain :

1. Menerima laporan dari seseorang atau kelompok orang atau masyarakat terhadap adanya kegiatan prostitusi disuatu tempat.
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian seperti melakukan pemeriksaan dengan memeriksa tanda pengenal diri tersangka seperti KTP atau alat bukti lainnya.
3. Membawanya ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.³

³ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

b) Melaksanakan Penampungan Sementara Untuk Diseleksi

Setelah dilakukan penangkapan melalui razia maka para tersangka ditampung sementara untuk diseleksi apakah para tersangka benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi dengan melakukan penyelidikan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan tersangka tidak terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi maka akan dilepaskan tetapi apabila terbukti melakukan maka diproses lebih lanjut.⁴

c) Melakukan Usaha Tindakan Rehabilitasi Sosial Kesusilaan

Rehabilitasi sosial kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarah para pelanggaran kesusilaan agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat.

Tindakan Rehabilitatif yang dilakukan antara lain :

1. Dilepaskan dengan syarat

Para tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi atau pelacuran akan dilakukan pendataan dan difoto setelah itu dilepas dengan syarat sebelumnya diberi peringatan dan diharuskan menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut dan apabila mereka tertangkap dua kali maka akan dikembalikan kekampung halaman.⁵

2. Dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)

⁴ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

⁵ . Yulizal, Tata Usaha Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

PSKW Putri Tujuh merupakan tempat penampungan pembinaan dan pelatihan bagi para WTS yang ada di Propinsi Riau Bertempat di Tanjung Pinang dan selamanya dilakukan Perda no 06 tentang pelanggaran kesusilaan belum ada dikirim kesana walaupun nanti ada namun masih merasa kewalahan karena WTS yang ditangkap dalam razia tidak dapat semuanya diterima oleh Panti PSKW karena tergantung dari beberapa orang WTS yang harus dikirim disana dan tergantung dana yang ada dalam pengiriman mereka sehingga beberapa harapan untuk pembinaan kurang efektif dikarenakan berbagai faktor.⁶

3. Dikembalikan kepada keluarga atau ketempat asal

Para tersangka yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi langsung didata secara lengkap lalu difoto kemudian dipanggilkan keluarga yang akan membawa PSK tapi jika tidak ada dikembalikan kekos-kos mereka dan bagi mereka terjaring dua kali akan dipulang kekampung halaman.

Para PSK yang ada dikota Tanjung Balai karimun bukanlah kebanyakan dari daerah tersebut melainkan kebanyakan pendatang atau perantau dari daerah lain seperti dari Jawa, Sumbar dan Sumut yang datang untuk mencari pekerjaan sementara didaerah tersebut tidak tersedia lapangan kerja yang cukup bagi mereka akhirnya mereka berprofesi sebagai PSK dan untuk mengembalikan mereka keluar atau kampung halaman pemerintah daerah juga mengalami kesulitan terutama dalam hal biaya pemulangan mereka karena tidak adanya alokasi dana

⁶ . Yulizal, Tata Usaha Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

dalam APBD Kabupaten Karimun untuk pembinaan dan atau pemulangan PSK ini dengan merupakan kendala tersendiri.⁷

Dan sepanjang tahun 2006 para PSK yang telah dipulangkan ke Daerah asalnya bisa dilihat di Tabel berikut:

Tabel. 3.2
Rekapitulasa Hasil Pemulangan PSK ke Daerah Asal

| No | Bulan | Dipulangkan Kedaerah Asal |
|---------------|-----------|---------------------------|
| 1 | Januari | 2 orang |
| 2 | Februari | - |
| 3 | Maret | 1 orang |
| 4 | April | - |
| 5 | Mei | - |
| 6 | Juni | - |
| 7 | Juli | 1 orang |
| 8 | Agustus | 3 orang |
| 9 | September | 5 orang |
| 10 | Oktober | - |
| 11 | November | - |
| 12 | Desember | 9 orang |
| Jumlah | | 21 orang |

Sumber: SAT POL PP KAB. Karimun, 2007

Dari tabel tersebut di atas menggambar bahwa PSK yang baru sanggup dipulangkan kedaerah asal sepanjang tahun 2006 sebanyak 21 orang.

4. Diserahkan ke Pengadilan untuk disidang

Selama disahkan atau diperlakukan perda no. 06 tentang pelanggaran kesusilaan terhadap kegiatan prostitusi atau pelacur dikabupaten Karimun terutama dikota Tanjung Balai Karimun belum pernah sama sekali para tersangkanya yang terbukti melanggar ketentuan larangan perda tersebut diserahkan kepengadilan untuk disidang tindak pidana ringan, karena sidang

⁷ . Yulizal, Tata Usaha Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

kasus Tripiring jarang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai Karimun.

Para pelaku pelanggaran kesusilaan memang seharusnya dilakukan sidang tindak pidana ringan dengan menyerahkannya ke pengadilan tapi karena jadwal sidang kasus Tripiring tidak rutin atau jarang dilakukan oleh pengadilan sementara hanya bisa dilakukan dengan melakukan pendataan, peringatan dan setelah itu dilepaskan kembali, dan tak jarang mereka kembali lagi beraksi melakukan kegiatan tersebut.⁸

2. Sanksi atau Hukuman Terhadap yang Melakukan Kegiatan Prostitusi

Dan bagi yang melanggar ketentuan larangan Perda yaitu melakukan kegiatan prostitusi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana pasal 4 ayat (4) perda No. 6 tentang pelanggaran kesusilaan yaitu barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Dan selama disahkan atau di berlakunya perda No. 06 tentang pelanggaran kesusilaan belum pernah diperlakukan karena para pelakunya belum pernah diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut dan yang hanya diperlakukan hanya didata, diberi peringatan dan kemudian dilepas, dan apabila dua kali tertangkap maka akan dikembalikan ke daerah asal, dan itu pun tidak semuanya bisa dikembalikan.

2. Wewenang Alat Negara Menindak Pelanggaran Perda No. 06 Tahun 2002

Pemerintah daerah berwenang dalam menindakan pelanggaran perda dan ada pun instansi yang diberi wewenang dalam menindak pelanggaran perda yaitu kepolisian

⁸. Sudirman, Kapolres Kota Tanjung Balai Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009.

dan SAT Pamong Praja sebagai penegak Perda sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat (1) menyatakan, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Dan adapun wewenangnya dalam menindak pelanggaran Perda anatar lain:

1. Menangkap atau menjaring dan menindak para pelaku pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan protitusi sesuai denagn kertentuan peeraturan daerah yang berlaku
2. Menutup tempat-tempat yang menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan prosituti seperti tempat-tempat yang menyediakan tempat unutk kegiatan prositituti seperti tempat – tempat penginapan (Hotel) mulai dari kelas atas sampai kelas (Wisma),tempat – tempat hiburan,panti pijat,salon kecantikan dan tempat yang diduga berkedokan kegiatan protituti ,sesuai dengan ketentuan peniadakan pasal 3 ayat 1 dan 2 perda No.06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang menyatakan ;ayat (1),pemerintah daerah berwenang menutup tempat – tempat yang diduga terbukti digunakan untuk pelanggaran kesusilaan,ayat (2),penggung jawab atau pemilik tempat-tempat yang telah diututp sebagaimana ayat (1) pasal ini,dilarangan melakukan kegiatan usahanya sampai ada keputusan yang lebih lanjutdari pemerintah daerah atau pihak berwenang.

Perda ini dikeluarkan dengan maksud tidak terjadinya penglegalan terhadap lokalisasi yang banyak terjadinyan pelanggaran kesusilaan tapi nyatanya yang terjadi Pemda tidak pernah menutup tempat yang jelas dijadikannya lokalisasi seperti Payalabu dan villa garden maupun hotel, cape – cape atau diskotik sebagai tempat hiburan yang diduga sebagai tempat perbuatan asusila.

Tetap dibukanya tempat tersebut agar pekerja seks komersial tidak berkeliaran di daerah perkotaan sehingga di daerah tersebut saja mereka menetap dan walaupun terjadinya pelanggaran hanya di daerah tersebut, begitu juga dengan penginhotelan yang sebagian besar penghuninya adalah wisatawan dari luar negeri selain tujuan mereka berbisnis juga melakukan kegiatan prostitusi di lain sisi juga tempat-tempat tersebut dibuka karena mendatangkan keuntungan besar bagi pemasukan APBD karena tempat tersebut diwajibkan membayar pajak, semakin banyak pengunjung akan semakin besar pendapatan daerah.⁹

3. Usaha atau Upaya Pemerintah Mencegah Munculnya Kegiatan prostitusi

Usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan Usaha preventif. Usaha preventif merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama – sama dengan instansi terkait serta didukung oleh lembaga – lembaga swadaya masyarakat berjuang untuk mencegah timbulnya pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi.

Usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pembinaan BAB VI, pasal 7 ayat (2) Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan yang berbunyi; Usaha sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan antara lain dengan:

- a. Penyuluhan dan Pembinaan Keagamaan
- b. Penyuluhan dan Pembinaan sosial
- c. Pembinaan Sosial
- d. Peningkatan derajat Kesehatan

⁹ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun. 28 Mei 2009.

Dalam usaha penyuluhan dan bimbingan keagamaan pemerintah berkerja sama dengan tokoh – tokoh agama baik itu instansi – instansi agama dan instansi pendidikan untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan agama kepada masyarakat terhadap larangan kegiatan protitusi dengan memberi solusi dan pemerintah daerah mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya akibat dari kegiatan kegiatan protitusi baik itu juga untuk kehidupan sosial dan kesehatan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan senantiasa meningkatkan draja kesehatan terutama mencegah dan menyebarnya penyakit yang diakibatkan oleh kegiatan protitusi yaitru HIV atau AIDS.¹⁰

C. Kendala Pemda Kab. Karimun Dalam Pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 Tentang pelanggaran Kesusilaan Terhadap Lokalisasi Prostitusi di Payalabu.

Adapun faktor kendala atau penghambat berjalannya Perda No. 06 tahun 2002 tersebut adalah terdiri dari hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal, dimana hambatan internal adalah hambatan yang datang dari dalam yaitu dari Pemda itu sendiri terutama instansi yang diberikan wewenang untuk menjalankan atau menegakkan Perda, sedangkan hambatan yang bersifat eksternal yaitu hambatan yang datangnya dari luar, yaitu dari para pelaku pelanggaran Perda seperti PSK dan masyarakat setempat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan ada beberapa hambatan-hambatan baik itu dari internal maun eksternal didalam pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi antara lain :

¹⁰. Syahrudin, Staf Dinas Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009.

1. Kurangnya personil pengamanan dalam menertibkan npara pelaku PSK.

Adapun jumlah kepolisian yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun sekitar 200 orang sedangkan SAT POL PP sekitar 110 orang. Jumlah personil tersebut tidak semuanya yang turun lngsung kelapangan pasti ada yang bergerak dibidang administrasi yang akibatnya sedikit sekali jumlah kepolisian maupun Satpol PP yang bergerak dilapangan.

Dengan keterbatasan jumlah mereka maka sangat sulit untuk melakukan penertiban terhadap para PSK yang tidak hanya di Lokalisasi Paya Labu, tetapi juga dijalan raya, diperhotelan, cafe maupun diskotik yang ada.

Selain itu terbatasnya tenaga Polwan diruang pelayanan khusus (RPK) karena di Polres Karimun Cuma hanya ada 3 Polwan saja, kurang tenaga polwan ini juga memberi pengaruh karena ada tentunya hal-hal tertentu yang hanya dikethui oleh perempuan sehingga masih dibutuhkan tenaga Polwan.¹¹

2. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi Sat Pol PP.¹²

Untuk memperoses kasus pelanggaran Perda pelanggaran kesusilaan, memerlukan tenaga pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran kesusilaan sesuai dengan kitab Undang-undang hukum acara pidana pasal 6 yang berbunyi :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang.

¹¹ . Syahrudin, Staf Dinas Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009.

¹² . Yulizal, Tata Usaha Sat Pol PP KAB. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009.

Kemudian pada pasal 7 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa : penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.

Jadi keberadaan PPNS sangat diperlukan dalam setiap operasi penertiban prostitusi, sedangkan Badan Satuan Pol PP baru memiliki 1 orang tenaga penyidik pegawai negeri sipil sehingga tidak dapat bekerja secara optimal dalam menegakkan perda tersebut. Kelemahan ini secara langsung berdampak pada tidak tertanganinya kasus pelanggaran Perda No. 06 tahun 2002 secara baik.

3. Adanya upaya penyelesain kasus pelanggaran Perda No. 06 tahun 2002 diluar prosedur oleh pejabat yang diberikan wewenang.

Dimana tujuannya adalah untuk menekan serendah-rendahnya praktek prostitusi yang jelas ditinjau dari ajaran agama manapun tidak bisa dibenarkan dalam praktek operasional, saat melakukan razia operasi refresif dan dapat menangkap beberapa PSK, ada saja anggota yang melakukan penyelesaian diluar prosedur yang berlaku, pada hal dalam Perda No. 06 tahun 2002 sudah ditegaskan bahwa pelanggaran Perda ini harus diproses dalam sidang tindak pidana ringan, Upaya penyelesaian diluar prosedur oleh oknum anggota juga berdampak negatif terhadap upaya penegakkan Perda.¹³

4. Kurangnya kordinasi atau kerja sama antara instansi yang terkait didalam pemberantasan Dalam upaya penegakkan perda No.06 Tahun 2002.

Mengalami kendala kordinasi atau kerja sama, karena diduga adanya aparat instansi keamanan tertentu yang menjadi backing dari kegiatan protitusi, sehingga setiap

¹³ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun. *Wawancara*., Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009

adanya operasi sudah bocor (diketahui oleh pihak mucikari atau PSK) bahkan setiap ada saja aparat yang berpakaian sipil yang mengintai operasi.

Biasanya para geromo juga memiliki jaringan dengan oknum dari instansi tertentu dengan imbalan uang disetor bulanan, sehingga kordinasi untuk mensukseskan operasi justru merupakan senjata makan tuan.

5. Kurang berperannya dinas sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi itu sendiri.

Hal ini dilihat dengan tidak adanya kebijakan atau program-program yang jelas dari dinas sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi terutama bagi para pelaku seperti para PSK supaya mampu kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

6. Keterbatasan biaya atau dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat menerapkan apa yang sesuai dengan aturan yang terdapat didalam Perda No. 06 Tahun 2002.

Hal ini terlihat dengan tidak adanya dana dari pemerintah daerah dalam penanggulangan kegiatan prostitusi, sebagaimana diketahui bahwa para PSK kebanyakan berasal bukan dari daerah tempatan tapi berasal dari luar daerah dan untuk mengembalikan mereka ke daerah asal membutuhkan dana, sehingga mereka tidak bisa di kembalikan dan akhirnya berkemungkinan mereka kembali berkerja sebagai pekerja seks komersial demi memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

7. Kurangnya kesadaran dari pekerja seks komersial yang sering melakukan perbuatan Asusila.

¹⁴ . Observasi, 29 Mei 2009.

¹⁵ . Nasrul, Staf Sekretariat DPRD Kab. Karimun, *wawancara*, Tanjung Balai karimun 29 Mei 2009.

Tujuan dikeluarnya perda ini salah satunya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan, apabila kesadaran ini ada pada setiap pekerja seks komersial maka dia tidak akan mau terjatuh di dunia prostitusi yang juga mereka terancam dengan penyakit yang mematikan maupun dosa yang harus dipertanggung jawabkan dengan pekerjaan yang dijalankan.

8. Semakin jelinya pekerja seks komersial dalam melakukan transaksi seks.

Sering aparat melakukan operasi atau razia tidak membuat jera pekerja seks komersial dalam melakukan aksinya, berbagai cara dilakukan mereka untuk melakukan aksinya, diantaranya adalah dengan tinggal (kost) di hotel sambil melakukan praktek prostitusi, sehingga tidak dipantau oleh aparat. Mereka kost di hotel secara kelompok sehingga biaya sewanya relatifnya murah. Dengan memilih kost di hotel maka transaksi seks makin mudah.¹⁶

9. Kurangnya dukungan warga masyarakat terhadap upaya pemerintah daerah dalam menertibkan pelanggaran perda.

Seperti diketahui bahwa perekonomian masyarakat di kabupaten Karimun khususnya di Kota Tanjung Balai Karimun sangat tergantung pada sektor pariwisata yaitu dengan masuknya para turis Singapura dan Malaysia dengan tujuan kedatangannya tidak lain untuk menikmati wisata seks, hal ini berlangsung cukup lama.

Pengaruh wisata seks ini juga sangat dirasakan oleh sektor usaha lain misalnya sektor perhubungan, rumah makan, kedai kopi, tukang ojek, pedagang kecil dan lain-lain, apabila sektor ini terganggu dalam artian aparat melakukan razia maka sektor perekonomian bisa lumpuh karena para turis takut masuk ke kabupaten Karimun, dan

¹⁶ Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun. *Wawancara*, Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009 .

praktis pendapatan masyarakat merosot.hal tersebut diatas menimbulkan sikap antipati warga masyarakat terhadap aparat sehingga operasi refresif tidak mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.¹⁷

Sedangkan pada pelaksanaan program dari Pemerintah Kab. Karimun terutama Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani masalah sosial dalam penanganan masalah PSK (prostitusi) di lokasi payalabu masih banyak kendala yang dihadapi. Adapun kendalanya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keseriusan Pemerintah Kab. Karimun dalam menangani masalah PSK.
2. Dirasakan kurangnya koordinasi dari Instansi yang terkait dalam pemberantasan prostitusi itu sendiri.
3. Tidak adanya wadah yang efektif dalam penangulangan prostitusi, artinya tidak ada panti seperti yang ada di Tanjung Pinang. Karena dengan adanya panti tersebut dapat menampung para wanita yang mempunyai keinginan untuk keluar dari lokasi itu.
4. Panti PSKW yang ada di Tanjung Pinang sangat memberikan keterbatasan kepada setiap kota atau kabupaten untuk mengirim PSK yang berkeinginan untuk dikirim kesana dan sering terkendala pada masalah dan dana pengiriman itu terbatas hanya sebanyak 2 orang.
5. Tidak adanya alokasi dana yang diharapkan benar-benar dapat membantu penanganan masalh prostitusi di Kabupaten Karimun.
6. Kurangnya tenaga dari pemerintah setempat khususnya Dinas Sosial dalam pembinaan, pelatihan dan keprofesionalan dalam penanganan prostitusi di lokasi payalabu.¹⁸

¹⁷ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun. *Wawancara*., Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009

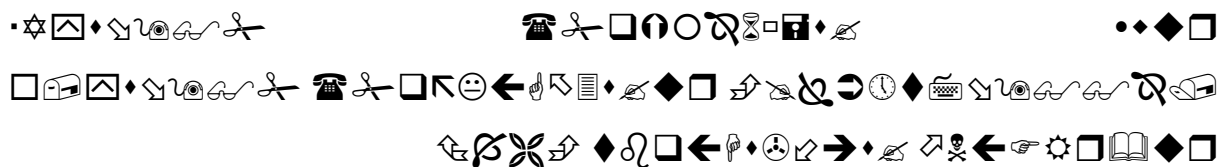
¹⁸ . Rahmadi, Staf Sat Pol PP Kab. Karimun. *Wawancara*., Tanjung Balai Karimun, 28 Mei 2009

Dari uraian di atas dan permasalahan yang dihadapi Dinsos sebagai instansi yang menangani masalah sosial dan Badan Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP , serta Kapolres yang ada di Kabupaten Karimun sebagai penegak Perda, jelas sangat membutuhkan dukungan masyarakat dan khususnya Pemerintah Kabupaten Karimun untuk jeli dan serius mensikapi permasalahan prostitusi ini terutama di lokasi payalabu. Karena dalam permasalahan prostitusi ini, seluruhnya diserahkan kepada pemerintah setempat dalam membersihkan Kabupaten Karimun dari penyakit sosial.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kendala Pemda Kab. Karimun Dalam Pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002, dalam Menanggulangi Prostitusi

1. Terhadap Realitanya

Kondisi lokalisasi Payalabu sangatlah unik Pemerintah daerah khususnya Pemda Kabupaten Karimun tidaklah melegalkan tempat tersebut namun tidak menutup tempat tersebut. Seakan-akan adanya ketakutan pemerintah untuk melokalisasikan tempat itu karena memandang terjadinya kontradisi diseluruh lapisan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi :



Artinya : ” Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui ”.¹⁹

Lokalisasi menurut hukum Islam harus mempunyai aturan tertentu dalam menghadapi masalah lokalisasi prostitusi. Lokalisasi kita ketahui adalah penempatan, tempat, yang sudah ditempati secara jelas. Seandainya lokalisasi prostitusi bertujuan mengajak para pelacur kejalan yang benar, maka agama akan memandangnya sebagai salah satu upaya menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.. seperti mana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّاهُمْ بِاللّٰهِ فَهُمْ يَمُنُّوْنَ اَنْ يَّهْتَدُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلَوْ كُنَّا مُنْذِرِيْنَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّاهُمْ بِاللّٰهِ فَهُمْ يَمُنُّوْنَ اَنْ يَّهْتَدُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلَوْ كُنَّا مُنْذِرِيْنَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّاهُمْ بِاللّٰهِ فَهُمْ يَمُنُّوْنَ اَنْ يَّهْتَدُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلَوْ كُنَّا مُنْذِرِيْنَ
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَّاهُمْ بِاللّٰهِ فَهُمْ يَمُنُّوْنَ اَنْ يَّهْتَدُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلَوْ كُنَّا مُنْذِرِيْنَ

Artinya : ” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”.²⁰

Dan firman Allah SWT juga dalam QS. Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ يُدْعَىٰ إِلَى الْمَلَأَةِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ مُّقَامًا رَّكَعًا ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُوَدِّعُ السَّافِهُونَ أَنْ يُسْرِفُوا ۚ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْتَرِفُوا ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ يُدْعَىٰ إِلَى الْمَلَأَةِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ مُّقَامًا رَّكَعًا ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُوَدِّعُ السَّافِهُونَ أَنْ يُسْرِفُوا ۚ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْتَرِفُوا ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ يُدْعَىٰ إِلَى الْمَلَأَةِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ مُّقَامًا رَّكَعًا ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُوَدِّعُ السَّافِهُونَ أَنْ يُسْرِفُوا ۚ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْتَرِفُوا ۚ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَلِكُلِّ مَكَانٍ يُدْعَىٰ إِلَى الْمَلَأَةِ وَلِكُلِّ مَكَانٍ مُّقَامًا رَّكَعًا ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُوَدِّعُ السَّافِهُونَ أَنْ يُسْرِفُوا ۚ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْتَرِفُوا ۚ

¹⁹. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 7
²⁰. *Ibid.* Hal. 63

Artinya : “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik “. ²¹

Dari ayat di atas jelas bahwa dengan kepemimpinan dan kekuasaan seseorang dapat hendaknya ia mampu mengerjakan (melaksanakan) tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan juga menunjukkan kepada sekelompok orang yang secara terorganisir.

Beberapa Pemerintah Daerah, membuat kebijakan lokalisasi prostitusi yaitu membatasi daerah prostitusi disuatu tempat tertentu, dengan pertimbangan untuk menghilangkan atau sekurang-kurangnya mengurangi pelacuran jalanan dan pelacuran bordir yang ada dikota, dekat dengan masyarakat yang akan menimbulkan kesan dan akibat buruk.

Jadi apabila dalam melokalisasi itu bertujuan untuk meminimalisir pelacuran atau PSK supaya tidak menyebar kemasyarakat yang mengakibatkan buruk bagi lingkungan masyarakat, serta dapat dijadikan tempat yang terorganisir dalam mengadakan pembinaan dalam membekali mereka agar tidak melanjutkan sebagai PSK atau pelacur. Dan mencegah dampak dari perzinahan (seks bebas) seperti menyebarkan penyakit menular dan sebagainya. Dan apabila lokalisasi tersebut dikoordinir dengan baik (pembinaan) dan adanya usaha-usaha prefentif dan responsive dari pemerintah maka agama tidaklah mengharamkannya.

Sedangkan dari hasil penelitian penulis yang penulis lihat bahwa keberadaan PSK berada dilokalisasi adalah sekitar 45 % dikarenakan faktor ekonomi. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nuur ayat 33 yang berbunyi :



²¹. Ibid. Hal. 64



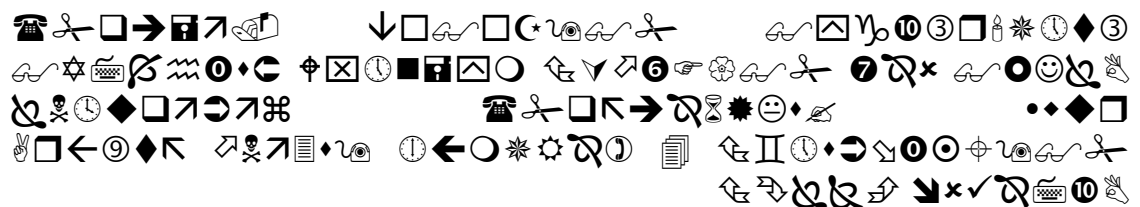
Artinya : " Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu ".²⁰

Dari ayat di atas jelaslah bahwa tidaklah ada alasan ataupun pekerjaan seperti prostitusi dijadikan cara untuk mencari kehidupan ekonomi, karena pekerjaan prostitusi dalam bentuk apapun tidaklah diridhoi Allah SWT. Dan prostitusi yang dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi keperluan ekonomi tidak dapat diterima secara moral dan rasional.

Dan Allah juga memerintahkan kita mencari rizki yang halal dan baik, halal dalam cara mendapatkannya dan baik bagi kesehatan, dan mencari rezki dengan melakukan pelacuran atau prostitusi adalah perbuatan yang tidak halal karena tidak

²⁰ . Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 354

langsung membiarkan orang untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :



Artinya : ” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu ”.²¹

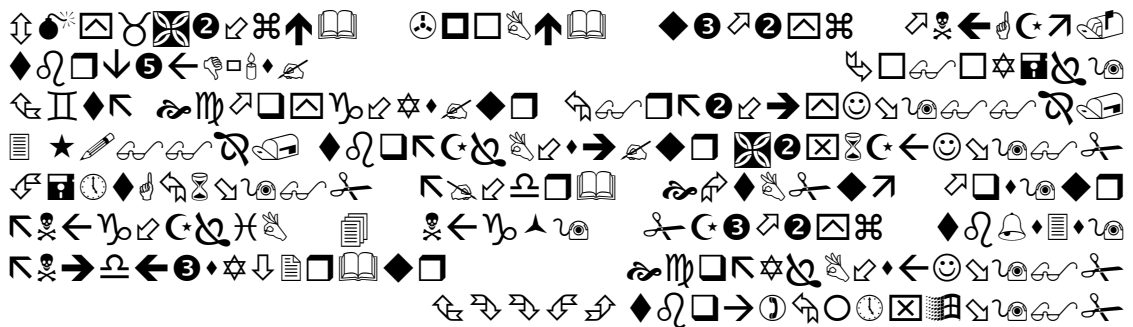
Sedangkan mengenai Peran Pemerintah daerah terutama yang diberikan wewenang dalam mencegah kegiatan prostitusi dengan melaksanakan penyuluhan, bimbingan sosial, pembinaan sosial , memberi jaminan keamanan dan kesehatan serta keselamatan, dan peningkatan drajat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT , yang meminta kita untuk saling membantu atau bekerja sama didalam mencegah yang buruk dan menyuruh kepada kebaikan sebagaimana yang berbunyi dalam QS. Ali-Imran ayat 104 di bawah ini :



Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”.²⁸

²¹ . Ibid. Hal. 25

Dan Allah SWT memberikan keutamaan bagi orang-orang yang selalu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, sepertimana firman-Nya dalam QS. al-Imran ayat 110 yang berbunyi:



Artinya : “ *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik* “. ²⁹

Dan Allah SWT juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong didalam kebaikan sebagai mana firman-Nya dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : “ *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa* ... ”. ³⁰

Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa apabila Peran Pemerintah tersebut dilakukan dengan sebaiknya maka tidak ada larangan dalam hukum Islam, dan Islam membenarkan hal tersebut.

²⁸. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 63

²⁹. *Ibid*, Hal. 64

³⁰. *Ibid*, Hal. 106

2. Terhadap Pelaksanaannya

a. Terhadap mekanisme atau prosedur pelaksanaan

1. Melaksanakan razia

Razia dilakukan untuk menjaring para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi dan tempat-tempat yang memfasilitasi atau menyediakan supaya dapat melakukan kegiatan prostitusi dengan mudah. Razia dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yaitu menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*), sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran, ayat 104 :



Artinya : ” Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”.¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diminta untuk mencegah (meniadakan) kemungkaran atau keburukan dan salah satunya termasuk kegiatan prostitusi atau pelacuran yang besar sekali dampak buruknya terhadap moral dan kelangsungan hidup manusia.

2. Melakukan penampungan sementara untuk diseleksi

¹⁹. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 63

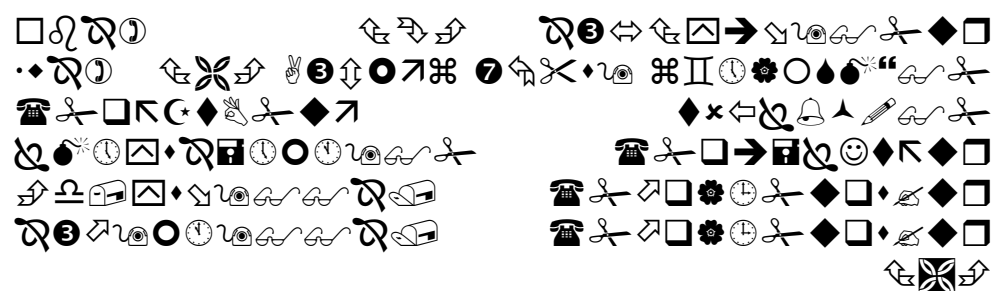
Setelah melakukan razia para tersangka akan dibawa ketempat penampungan sementara seperti kantor Sat Pol PP atau Polisi untuk diseleksi dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui apakah para tersangka melakukan pelanggaran terhadap Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kegiatan prostitusi. Hal ini juga termasuk usaha untuk mencegah dari perbuatan keji atau mungkar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Melakukan tindakan Rehabilitasi

Adapun tindakan Rehabilitasi yang dilakukan adalah :

1. Dilepaskan derngan syarat

Sebelum mereka dilepaskan terlebih dahulu diperingatkan atau dinasehati agar tidak melakukan perbuatan tersebut dengan membuat surat perjanjian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Untuk saling nasehat menasehati didalam kebenaran dan kesabaran sebagai mana firman Allah SWT QS. al-'ashr ayat 1-3 :

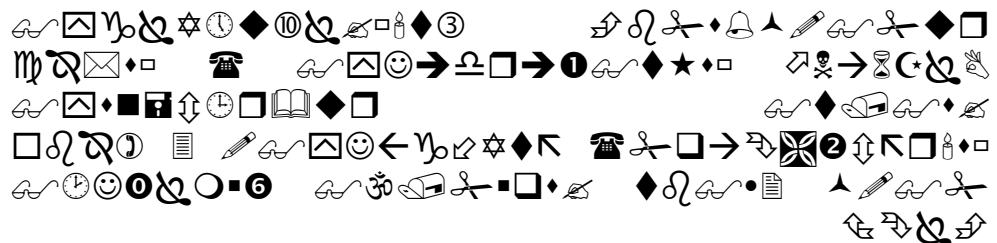


Artinya : " Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran ".²⁰

2. Dimasukkan didalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW).

²⁰. Ibid, Hal. 601

PSKW merupakan tempat penampungan pembinaan dan pelatihan atau keterampilan didalam pekerjaan bagi WTS yang bertujuan agar mereka bisa kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan masyarakat. Usaha upaya yang dilakukan seperti ini juga termasuk mencegah dari pada kemungkaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Dan upaya ini juga dilakukan agar mereka sadar, sebagai mana firman Allah SWT QS. an-nisaa' ayat 16 :



Artinya : “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.²¹

3. Dikembalikan kepada keluarga atau kedaerah asal.

Bagi para PSK yang tertangkap dua kali didalam operasi razia dikembalikan ke daerah asal, sebagai mana diketahui bahwa para pelaku bukan kebanyakan dari daerah Kabupaten Karimun melainkan dari luar daerah Karimun,²² hal ini dilakukan untuk mencegah dan mediadakan lagi kegiatan prostitusi dan jika ditinjau dari hukum Islam hal ini tidak bertentangan.

4. Diserahkan kepengadilan untuk disidang

²¹. *Ibid*, Hal. 80

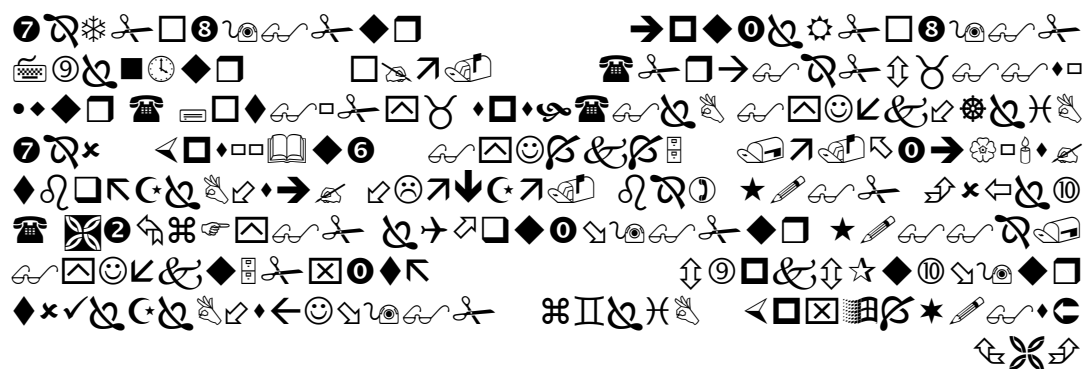
²². Sensissiaawa , Kadinsos Kab.Karimun, wawancara, Tanjung Balai Karimun, Tanggal 24 Oktober 2008.

Selama diperlakukannya Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan belum pernah sama sekali para pelaku diserahkan kepengadilan, yang seharusnya diserahkan karena disebabkan oleh beberapa hal yang sebagai mana yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

b. Sanksi terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi

Didalam Islam hukuman atau sanksi terhadap perbuatan zina atau pelacuran termasuk kedalam salah satu hukuman hudud atau had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan batas kadarnya oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an dan Hadist ketentuan itu berlaku secara mutlak yang tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh manusia.²³

Seperti mana firman Allah SWT dalam QS. an-Nur ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : " Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ".²⁴

Apabila dibandingkan dengan hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh pemerintah daerah yang sebagaimana terdapat pada Perda No. 06 tahun 2002 tidak sesuai karena hukumannya tidak sama terhadap apa yang telah ditentukan didalam al-

²³. M. Nasir Cholís, *Fiqh Jinayat (Pidana Islam)*, (Pekanbaru : SUSQA Pres, 2000), Cet. Ke-1. Hal. 34.

²⁴. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 350

Qur'an dan Hadist, apa lagi pada saat ini pemerintah daerah hanya mampu memberikan peringatan atau nasehat bagi mereka yang melakukan perzinaan atau pelacuran, sedangkan menurut hukum Islam hukuman *hudud* tidak bisa gugur dengan hanya memberi peringatan atau nasehat apa lagi mereka sudah jelas-jelas melakukan kegiatan prostitusi atau pelacuran.

- c. Wewenang alat Negara dalam menindak pelanggaran Perda terutama kegiatan prostitusi.

Pihak yang diberi wewenang yaitu kepolisian dan Sat Pol PP berwenang melarang, menangkap para pelaku yang melakukan kegiatan prostitusi, dan menutup tempat-tempat yang menyediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik atau ditegakkan jika tidak adanya pihak yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk menanggulangi permasalahan hukum yang dihadapi. Dan sudah seharusnya untuk bertindak sebagai mana hadis Nabi yang berbunyi :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

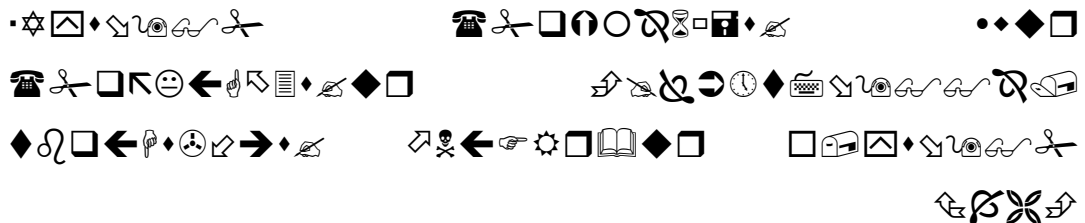
Artinya : “Siapa dari kalian mengetahui kemungkaran, maka robahlah dengan tanganya (kekuasaannya), apabila tidak kuasa maka robahlah dengan lisannya, apabila tidak kuasa maka robahlah dengan hatinya (merasa benci), dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman “. ²⁵

Dari observasi peneliti kewenangan yang dimiliki belum sanggup direalisasikan karena pemerintah belum menutup tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang telah jelas melakukan kegiatan prostitusi dengan alasan biar mereka tidak berkeliaran didaerah perkotaan atau daerah yang banyak masyarakatnya, sehingga didaerah tersebut saja mereka menetap, walaupun terjadinya pelanggaran kesusilaan

²⁵. Adib Basri Musthofa, *Shahih Muslim*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), Hal. 233.

hanya didaerah tersebut, dan alasan lain adalah tempat-tempat tersebut mendatangkan untung besar bagi pendapatan daerah atau perekonomian rakyat.

Dari alasan tersebut di atas tetap saja salah bila ditinjau menurut hukum Islam karena dengan tidak langsung telah membenarkan kegiatan prostitusi sedangkan kegiatan tersebut dilarang didalam Islam. Dalam al-Qur'an cara seperti ini berarti menyampaikan yang hak (benar) dan yang batil (yang tidak benar) secara bersamaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya”.²⁶

Dari hadist Nabi bahwa Rasulullah mengatakan bahwa yang benar sudah jelas dan yang tidak benar juga sudah jelas maka diantara keduanya merupakan perbuatan meragukan (*Syubhat*) dan jangan dilakukan. (HP. Tabrani dan Umar Bin Khatab).

Di dalam Islam upaya atau usaha menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan lebih diutamakan sebagaimana salah satu kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari bahaya lebih diutamakan dari meraih manfa'at”.²⁷

²⁶. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 7

Dalam kaedah ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan atau peraturan sesuai dengan skala prioritas, kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, disuatu sisi menguntungkan tapi disisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya, seperti tempat-tempat yang harus disediakan untuk melakukan kegiatan prostitusi walaupun mendatangkan pendapatan bagi pemerintah tapi dampak buruk yang dirasakan sangat berbahaya.

d. Usaha dan upaya Pemda dalam mencegah kegiatan prostitusi

Pemerintah daerah terutama yang diberikan wewenang bekerja sama dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat dalam mencegah kegiatan prostitusi dengan melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan sosial, pembinaan sosial dan peningkatan drajat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT , yang meminta kita untuk saling membantu atau bekerja sama didalam mencegah yang buruk dan menyuruh kepada kebaikan sebagaimana yang berbunyi dalam QS. Ali-Imran ayat 104 di bawah ini :

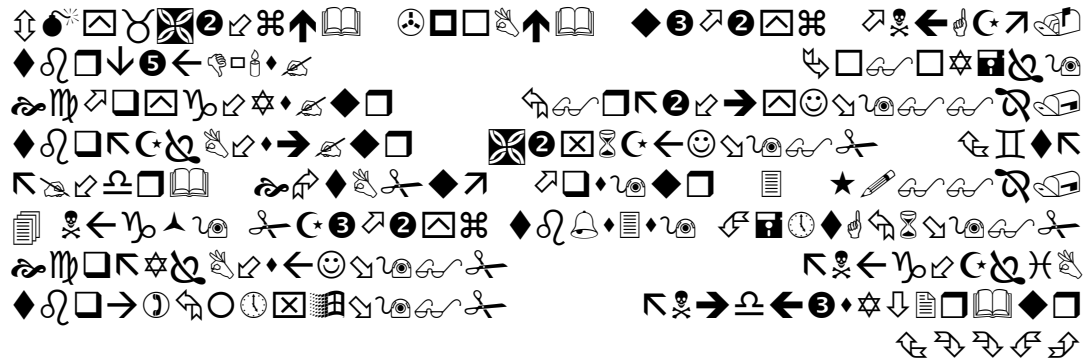


Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”.²⁸

²⁷. Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhitah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1994), Hal. 65.

²⁸. Dept. Agama RI. *al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 63

Dan Allah SWT memberikan keutamaan bagi orang-orang yang selalu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran, sepertimana firman-Nya dalam QS. Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi:



Artinya : “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik “. ²⁹

Dan Allah SWT juga memerintahkan kita untuk saling tolong menolong didalam kebaikan sebagai mana firman-Nya dalam QS. al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa ... ”. ³⁰

3. Terhadap Faktor-faktor Kendala Dari Pelaksanaannya

²⁹. Ibid, Hal. 64

³⁰. Ibid, Hal. 106

Pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama penertiban kegiatan prostitusi belum terlaksana dengan optimal, ini dikarenakan oleh dua faktor yaitu faktor Interen dan faktor eksteren.

1. Faktor Interen

Kendala atau hambatan yang datang dari dalam yaitu dari Pemda itu sendiri terutama instansi-instansi yang diberi wewenang untuk menanggulangi permasalahan penertiban prostitusi dan hambatan antara lain : kurangnya personil yang diperlukan dalam rangka menertibkan kegiatan prostitusi, kurangnya tenaga penyidik pegawai negeri (PPNS) di instansi Sat. Pol PP, adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran Perda No. 06 tahun 2002 oleh pejabat yang diberikan wewenang. Kurangnya kerja sama antara instansi terkait didalam pemberantasan prostitusi, kurang berperannya dinas sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi dan keterbatasan anggaran atau biaya dari pemerintah daerah.

Apabila kendala atau hambatan interen ini ditanggulangi atau di cari solusi dengan baik agar upaya atau usaha didalam mencegah dan meniadakan kegiatan prostitusi bisa berjalan dengan baik dan menyampaikan kepada tujuan yang diinginkan bersama, maka tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya : “ Dan hendaklah ada (tersusun) diantara kamu, segolongan yang (kuat terorganisir) yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang melakukan perbuatan yang mungkar, mereka

*yang berlaku demikian orang-orang yang menang. (QS. Ali-Imran 3 : 104).*³¹

Begitu juga dengan Dinsos hendaknya berperan dengan baik, apabila Dinsos membuat kebijakan dan melaksanakan dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi dan meniadakan kegiatan prostitusi tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor kendala atau hambatan yang datangnya dari luar, yaitu para pelaku pelanggar Perda seperti PSK dan masyarakat setempat dan kendala itu antara lain : kurangnya kesadaran dari pekerja seks komersial yang sering melakukan perbuatan asusila dan semakin jelinya mereka dalam melaksanakan transaksi seks yang seharusnya mereka sadar bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan. Allah SWT, telah tegas dan jelas melarang untuk tidak melakukan perzinahan apa lagi menjadikan perbuatan zina sebagai propesi atau pekerja ataupun menjadikannya sebagai kebiasaan.

Dalam agama Islam, menurut ulama Fiqh ada lima unsur pokok yang harus dijaga yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Larangan berzina atau melacur termasuk memelihara keturunan. Karena itu Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah bagi yang telah sanggup, seperti mana firman Allah SWT dalam QS : an-Nuur ayat 32 yang berbunyi :



³¹ . Dept. Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung : Penerbit PT.Syaamil Cipta Media 2005), cet ke. 3, hal. 63



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang sudah pantas kawin dari hambamu pria dan wanita. Jika mereka miskin, nanti Allah memberikan karunia kepada mereka. Dan Allah maha luas karunianya dan maha tahu”.³²

Sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya menahan diri. Dalam menahan diri Rasulullah menganjurkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa seseorang dapat mengendalikan diri dari hawa nafsu. (HR. Bukhari dari Abdullah Bin Mas’ud).

Dari uraian firman Allah dan Hadis Rasulullah di atas dapat dipahami bahwa tidak perlu ada kekawatiran terhadap mereka yang melakukan perkawinan. Allah memerintah agar manusia menghindari dari kesendirian dan Allah memberikan jaminan ekonomi melalui perkawinan. Dari ayat di atas tersebut dapat juga dijelaskan bahwa tidak ada alasan suatu pekerjaan seperti prostitusi dijadikan cara untuk mencari kehidupan ekonomi kecuali dipaksa, sedangkan ia sendiri tidak menginginkan perbuatan tersebut.

Terhadap dukungan masyarakat seharusnya masyarakat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah mencegah kemungkaran dan salah satunya kegiatan prostitusi bukan malahan mendukungnya dikarenakan berpendapat atau merasa apabila kegiatan prostitusi atau pelacuran diberantas secara total maka akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka baik itu disektor pariwisata, perhubungan, perhotelan, rumah makan sampai ketukang ojek atau menghalangi mereka untuk

³² . *Ibid*, Hal. 354.

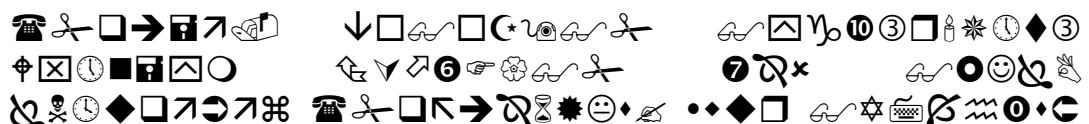
melakukan kegiatan prostitusi pendapat seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 104 :



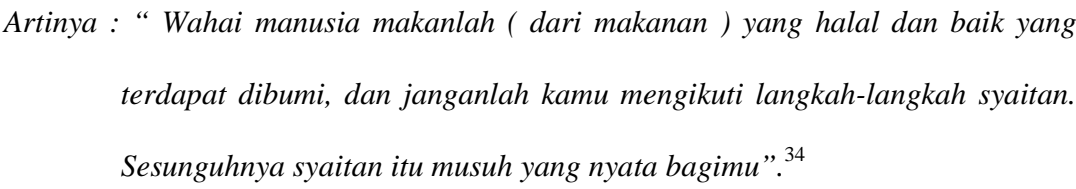
Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”³³

Walaupun kegiatan prostitusi itu ada untungnya bagi perekonomian masyarakat, tapi tidak sebanding dengan kerusakan atau bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, karena Islam memegang prinsip bahwa menghindari bahaya lebih baik dari pada mengambil manfaatnya.

Dan Allah memerintahkan kita mencari rezki yang halal dan baik, halal dalam cara mendapatkannya dan baik bagi kesehatan, dan mencari rezeki dengan melakukan pelacuran atau menyediakan dan mengambil keuntungan dari kegiatan pelacuran adalah perbuatan yang tidak halal karena secara tidak langsung membiarkan orang untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 168 dibawah ini :



³³ . Ibid. Hal. 63.

[illegible]

Artinya : " wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin diantara kalian".³⁵

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak, berdasarkan kata *athi'u* yang mendahului kata Allah dan Rasulnya, sedangkan kepatuhan kepada *ulu al-amr* bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam.³⁶

³⁶. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Cet., Ke-1, hal. 7.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menguraikan secara komprehensif pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat dan akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap Realitanya

Dilihat dari realitan keberadaan PSK dilokalisasi adalah sekitar 45 % dikarenakan faktor ekonomi. Dan terhadap Peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun terhadap PSK yang berada dilokalisasi Payalabu belumlah maksimal dan masih ada kendala dalam arti kata tidak ” Berperannya ” dalam menanggulangi permasalahan prostitusi di lokalisasi Payalabu. Dan jumlah PSK yang berada di lokalisasi semakin membesar dan keberadaan para PSK tersebut silih berganti dan bahkan ada yang bertempat tinggal cukup lama dilokalisasi.

2. Pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan khususnya pelaksanaan penertiban prostitusi di lokalisasi Payalabu dan umumnya di Kab. Karimun belum optimal dilakukan atau dilaksanakan, walaupun secara praktis pelaksanaan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait yang diberikan wewenang seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda didalam membantu pemerintah daerah dan Dinas Sosial namun masih saja ada yang melakukan kegiatan prostitusi.

3. Adapun faktor-faktor kendala atau penghambat dari pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002, baik itu yang bersifat intern maupun ekstern adalah :

- a. Kurangnya personil yang diperlukan dalam rangka menertibkan kegiatan prostitusi.

- b. Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di instansi Sat Pol PP sebagai penegak Perda.
- c. Adanya upaya penyelesaian kasus pelanggaran Perda diluar prosedur oleh pejabat yang diberi wewenang.
- d. Kurangnya koordinasi atau kerja sama antara instansi terkait didalam penanggulangan kegiatan prostitusi.
- e. Kurang berperannya Dinas Sosial dalam penanggulangan kegiatan prostitusi.
- f. Keterbatasan biaya atau dana didalam usaha atau upaya penanggulangan kegiatan prostitusi.
- g. Kurangnya kesadaran dari masyarakat yang didalam melaksanakan Perda terutama para pekerja seks komersial yang sering melakukan kegiatan prostitusi.
- h. Semakin jelinya perkerja seks komersial didalam melakukan transaksi seks.
- i. Kurangnya dukungan dari warga masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan pelanggaran Perda.

Adapun tinjauan hukum Islam terhadap kendala pemerintah daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tersebut, yang bersifat interen dan eksteren tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, apabila kendala atau hambatan interen dan eksteren ini ditanggulangi atau di cari solusi dengan baik agar upaya atau usaha didalam mencegah dan meniadakan kegiatan prostitusi bisa berjalan dengan baik dan menyampai kepada tujuan yang diinginkan bersama.

A. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang tertulis tentang Kendala Pemerintah Daerah Kab. Karimun dalam pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terhadap lokalisasi prostitusi di Payalabu dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Begitu besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh prostitusi baik itu terhadap moral atau mental dan kesehatan masyarakat maka Pemerintah daerah hendaknya serius dalam memberantasnya dengan melaksanakan Perda No. 06 tahun 2002 dengan sepenuhnya berdasarkan dari ketentuan yang sudah ada tanpa adanya keraguan, dengan mengawasi dan menindak tegas terhadap para pelanggar Perda No. 06 tahun 2002 terutama di tempat Lokalisasi Payalabu. Hal ini harus dilakukan agar jangan ada anggota yang menyalahi prosedur didalam pelaksanaannya seperti menjadi bekingan kegiatan prostitusi seperti menutup-nutupi atau membocorkan operasi razia dan selalu mencari solusi atau jalan keluar yang tepat dalam menangani kegiatan prostitusi.
2. Masyarakat setempat hendaknya mematuhi kebijakan pemerintah daerah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan kebaikan bersama dan membantu atau mendukung pemerintah daerah dalam menanggulangi kegiatan prostitusi.
3. Para pelanggar Perda baik itu PSK maupun tempat-tempat yang dengan sengaja menyediakan kegiatan prostitusi untuk dapat sadar dan meninggalkan dari usaha yang ia lakukan karena tidak sebanding dengan akibat buruk yang dirasakan baik perorangan maupun kelompok (masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Prof, MA, H, *Fiqh Jinayat (upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. Cet ke-2.
- Ahmad Hanafi, Azaz – Azaz *Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993. Cet ke-5.
- Ali Ahmad al Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus : Dar al-Qalam, 1994. Cet ke-2.
- Amir Syarifudin, Prof, Dr. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Perenada Media. 2003. Cet ke-3.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No ! Nikah Yes*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007. Cet ke-1.
- A. Rahman I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'at)*, Jakarta : Raja Grafindo Pranada, 2002. Cet ke-6.
- Collier Rohan, *Pelecehan Seksual*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998. Cet ke-1.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Thoha Putra, Semarang , 1998. Cet ke-3.
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990. Cet ke-1.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001. Cet ke-2.
- Michel Penepoulosi, *Lika Liku Gadis Panggilan*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000. Cet ke-3.
- M. Nasir Cholis, Drs. H. *Fiqh Jinayat (Pidana Islam)*, Pekanbaru : SUSQA Pres, 2004. Cet ke-1.
- Muchlis Usman, MA, *Kaidah-Kaidah Ushul Fiqiyah dan Fiqiyah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Cet ke-3.
- Muhammad Iqbal, Prof. M.Ag. *Fiqh Siyasah , Konstektualisasi Dokrin Politik*, Jakarta : Gaya Media Peratama. 2001. Cet ke- 3.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun (PERDA), Nomor 06 Tahun 2002. *Pelanggaran Kesusilaan*. Tanjung Balai Karimun 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Terjemahan A. Marzuki, Bandung 1997. Cet ke-2.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Surabaya : Penerbit Usaha Nasional, 1981. Cet ke-6.

Tabloid Semai, *Ditutupnya Lokalisasi WTS*. Jakarta : Koalisi Perempuan Indonesia 2000. Cet ke-7

Tim Redaksi, *Undang-undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004*. Jakarta : Ramdina Prakarsa, 2004. Cet ke-2.

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Tabel 1.1: Data Jumlah PSK Dilikasi Payalabu Sejak Tahun 2004 – 2008 | 22 |
| 2. Tabel 2.1 : Biodata Responden (PSK Lama Bekerja Dilokalisasi) | 32 |
| 3. Tabel 2.2 : Latar Belakang Berada Dilokalisasi | 32 |
| 4. Tabel 2.3 : Penghasilan PSK Rata- Rata Perbulan | 33 |
| 5. Tabel 2.4 : Jaminan Keamanan dan Kesehatan Serta Keselamatan PSK Dilokalisasi | 34 |
| 6. Tabel 2.5 : Tanggapan Masyarakat Sekitar Lokalisasi Terhadap PSK | 34 |
| 7. Tabel 2.6 : Peran Pemerintah Kabupaten Karimun (Dinsos) Dalam Memberikan Penyuluhan Pencegahan Penyakit HIV / AIDS | 35 |
| 8. Tabel 2.7 : Perhatian Dinas Sosial Terhadap PSK | 36 |
| 9. Tabel 2.8 : Bagaimana Pemda Kab. Karimun (Dinsos) Dalam Pembinaan Keterampilan Agar Dapat Meninggalkan Lokalisasi (Profesi PSK) | 36 |
| 10. Tabel 2.9 : Bantuan Pemda Kab. Karimun (Dinsos) Berbentuk Material Agar Responden Meninggalkan Profesinya | 37 |
| 11. Tabel 2.10 : Dalam Bidang Kerohanian Adakah Peran Pemda (Dinsos) Kabupaten Karimun | 38 |
| 12. Tabel 2.11 : Rekapitulasi Tabel 1 – 10 | 38 |
| 13. Tabel 3.1 : Data Hasil Razia PSK Pada Tahun 2007 di Kabupaten Karimun | 42 |
| 14. Tabel 3.2 : Rekapitulasi Hasil Pemulangan PSK ke Daerah Asal | 45 |

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Karimun terutama pelaksanaan penertiban prostitusi.
 - a. Terhadap mekanisme atau prosedur pelaksanaan.
 - b. Wewenang alat Negara menindak pelanggaran Perda.
 - c. Apa sanksi atau hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi.
 - d. Bagaimana upaya atau usaha pemerintah Daerah dalam mencegah munculnya kegiatan prostitusi.
2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.
3. Bagaimana proses terbentuknya Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.
4. Apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan.
5. Faktor kendala atau penghambat apa saja terjadi dalam pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan terutama kendala dalam pelaksanaan penertiban kegiatan prostitusi.

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati langsung pelaksanaan penertiban prostitusi yang dilakukan pemerintah daerah terutama instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Perda tersebut.
2. Mengamati langsung kegiatan prostitusi yang terjadi di Kabupaten Karimun terutama Lokasi Payalabu.
3. Mengamati langsung kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda No. 06 tahun 2002.

**PERATURAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PELANGGARAN KESUSILAAN**

Pasal 1 (Tentang Ketentuan Umum) yang terdiri dari :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karimun
6. Pelanggaran Kesusilaan adalah segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dengan sengaja dilakukan dimuka umum yang dapat merusak kesopanan utamanya berkaitan dengan kegiatan prostitusi
7. Prostitusi adalah Pertukaran hubungan seksual dengan uang ataupun hadiah-hadiah tertentu sebagai suatu transaksi perdagangan
8. Rehabilitasi Sosial Kesusilaan adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk mengarahkan para pelanggaran kesusilaan, agar mampu kembali melaksanakan fungsi social secara wajar dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 2 (Ketentuan Larangan) yang terdiri dari :

1. Dalam Daerah Kabupaten Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran Kesusilaan
2. Larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :
 - a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri orang lain atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi
 - c. Menyediakan tempat, dan, mencari, mendatangkan, mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi

- d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum
 - e. Mempertunjukan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesopanan
3. Membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran Kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 3 (Ketentuan Pendidikan) yang terdiri dari :

1. Pemerintah daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk Pelanggaran Kesusilaan
2. Penanggung Jawab dan atau pemilik tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dilarang melakukan kegiatan usahanya sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah Daerah atau pihak berwenang

Pasal 4 (Ketentuan Pidana) yang terdiri dari :

1. Barang siapa yang sengaja melanggar terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
2. Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 5 (Penyidikan) yang terdiri dari :

1. Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Kesusilaan
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan
- c. Berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- g. Mengadakan penghentian atas penyidikan setelah dinyatakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi kewenangannya.

Pasal 6 (Pembinaan) yang terdiri dari :

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Karimun melalui usaha Preventif, Represif dan Rehabilitatif.

Pasal 7 :

1. Usaha Preventif dimaksud untuk mencegah timbulnya Pelanggaran Kesusilaan dalam masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya Masalah Tuna Susila.
2. Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan antara lain dengan :
 - a. Penyuluhan dan Bimbingan Keagamaan
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - c. Pembinaan Sosial
 - d. Peningkatan Derajat Kesehatan

Pasal 8 :

1. Usaha Represif dimaksud untuk mengurangi dan atau meniadakan tindakan Pelanggaran Kesusilaan

2. Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Razia
 - b. Penampungan sementara untuk seleksi
 - c. Pelimpahan
3. Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang yang telah ditetapkan melalui peraturan yang berlaku
4. Razia dapat juga dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang terbatas dan dilaksanakan bersama-sama dengan Kepolisian

Pasal 9 :

Pelaku Pelanggaran Kesusilaan yang Razia ditampung dalam penampungan sementara untuk di seleksi.

Pasal 10 :

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimaksud untuk menetapkan kualifikasi para Pelanggaran Kesusilaan dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan Rehabilitatif selanjutnya yang terdiri dari :

- a. Dilepaskan dengan syarat
- b. Dimasukkan dalam Panti Sosial Karya Wanita (PSKW)
- c. Dikembalikan kepada Keluarga
- d. Diserahkan ke Pengadilan.¹

¹ PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 Tentang “*Pelanggaran Kesusilaan*” 2002 .

ANGKET

N a m a (samaran) :

U m u r :

Pendidikan Terakhir :

A. Petunjuk Mengisi Angket !

1. Pilihlah salah satu jawaban dan berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih.
2. Penyebaran angket ini hanyalah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

B. Daftar Pertanyaan !

1. Sudah berapa lama saudara berada dilokalisasi ini ?
 - a. 1 – 2 tahun
 - b. 2 – 3 tahun
 - c. 3 tahun Lebih
2. Apa latar belakang saudara / i sehingga berada dilokasi ini ?
 - a. Karena tertipu
 - b. Karena paktor ekonomi
 - c. Karena kecewa
3. Berapa penghasilan bersih rata-rata anda dalam sebulan ?
 - a. 200.000 s/d 400.000
 - b. 500.000 s/d 600.000
 - c. Satu juta keatas
4. Apakah keamanan dan kesehatan dan keselamatan anda disini terjamin ?
 - a. Sangat terjamin
 - b. Kurang terjamin

- c. Tidak terjamin
5. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar lokasi terhadap anda ?
- a. Perhatian
 - b. Biasa-biasa saja
 - c. Sini
6. Bagaimana peranan Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) dalam memberikan penyuluhan tentang pencegahan penyakit kelamin (AIDS / HIV) ?
- a. Sangat berperan
 - b. Kurang berperan
 - c. Tidak berperan
7. Bagaimana perhatian dari Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) pada lokasi anda ?
- a. Sangat baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik
8. Bagaimana peran Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) melakukan pembinaan dalam bidang keterampilan agar anda dapat meninggalkan lokasi ?
- a. Sangat membantu
 - b. Kurang membantu
 - c. Tidak membantu
9. Apakah ada Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) memberikan bantuan terhadap anda agar anda meninggalkan profesi anda sebagai PSK ?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak ada

10. Apakah Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) memberikan pembinaan kerohanian terhadap anda ?

- a. Sering
- b. Kadang-kadang
- c. Tidak pernah

11. Apakah harapan anda terhadap Pemerintah Kab. Karimun (Dinsos) terhadap lokasi ini ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. Apakah tanggapan anda terhadap Perda No. 06 Tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusilaan yang dibuat oleh Pemerintah Kab. Karimun terhadap lokasi ini ?

.....

.....

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan di Kabupaten Karimun terutama pelaksanaan penertiban prostitusi.
 - a. Terhadap mekanisme atau prosedur pelaksanaan ?
 - b. Wewenang alat Negara menindak pelanggaran Perda ?
 - c. Apa sanksi hukuman terhadap yang melakukan kegiatan prostitusi ?
 - d. Bagaimana upaya atau usaha pemerintah Daerah dalam mencegah munculnya kegiatan prostitusi ?
2. Apa yang melatar belakangi lahirnya Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
3. Bagaimana proses terbentuknya Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
4. Apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Perda No. 06 Tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?
5. Bagaimana sejarahnya lokasi Prostitusi Payalabu ?
6. faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dari pelaksanaan Perda No. 06 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan ?

PANDUAN OBSERVASI

1. Mengamati langsung pelaksanaan penertiban prostitusi yang dilakukan pemerintah daerah terutama instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Perda tersebut ?
2. Mengamati langsung kegiatan prostitusi yang terjadi di Kabupaten Karimun terutama di Lokalisasi Payalabu.
3. Mengamati langsung kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Perda No. 06 Tahun 2002.
4. Jumlah kelompok PSK dilokasi Payalabu.
5. Kegiatan dan aktifitas masyarakat di selingkungan Payalabu
6. Kondisi PSK (rumah, pasilitas, sarana dan ekonominya) dilokasi Payalabu.
7. Pergaulan masyarakat diluar lokasi Payalabu dan didalamnya.
8. Perubahan yang telah dilakukan Pemerintah Kab. Karimun (Bupati dan Dinsos) kepada para PSK dan lingkungan tersebut.
9. Sikap RT (Rumah Tangga) dilokasi Payalabu dalam mengatur warganya.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Fazli, lahir di Pulau Parit Kecamatan Karimun Kab. Karimun pada tanggal 25 April 1986. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, yang merupakan anak dari pasangan tercinta **Syaripuddin** (Ayah), dan **Iryani** (Ibu).

Penulis mengawali jenjang pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 010 Parit 1 Karimun pada tahun 1993 dan menamatkan pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 003 Parit Karimun pada tahun 1998 dan tamat pada tahun 2001, selanjutnya meneruskan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tanjung Pinang pada tahun 2001 dan menamatkan pada tahun 2004.

Setelah menyelesaikan pendidikan di MAN Tanjung Pinang, penulis melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum sebagai Mahasiswa Undangan atau (PBUD). Alhamdulillah pada tanggal 02 Juni 2010 penulis lulus dalam ujian sarjana dan mendapatkan predikat (Memuaskan) dengan menyandang gelar Sarjana Huku Islam (S.HI).